

CITRA LAMPUNG DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, Oktober 2004

Een gedeelte van de
Sumatra.

Getekend naar 'Origines' van de Heer D.



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Lampung merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya adalah merupakan kegiatan dalam bentuk pengungkapan kembali memori kolektif daerah dalam NKRI. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Dengan mencermati informasi yang tersimpan dalam arsip akan diperoleh informasi akurat dan obyektif

mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan sebagai Bangsa Indonesia.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam program ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah yang ada melalui Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian harus dipahami pula bahwa semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini hanyalah berisi sebagian dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 6 Oktober 2004
Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Daftar Pustaka	13
Citra Lampung Dalam Arsip	14
Geografi	15
Pemerintahan	27
Transmigrasi	35
Kunjungan	64
Pendidikan dan Kebudayaan	69
Irigasi/Pengairan	82
Perkebunan.....	87
Perindustrian.....	96
Hasil Bumi	105
Pertambangan.....	110
Perhubungan	114
Perdagangan.....	127
Agama	133
Daftar Arsip Yang Diserahkan	136
Penutup.....	155

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diterapkan. Undang-undang tersebut mengamanatkan diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan layanan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal. Kebijakan ini merupakan usaha untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan dan kewenangan yang selama ini terjadi. Dalam pelaksanaannya, penerapan Otonomi Daerah ini tidak luput dari eksekusi negatif. Eksekusi ini berupa euforia yang berlebihan, yakni munculnya keinginan dari sekelompok masyarakat di daerah yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada gilirannya eksekusi ini dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Citra Lampung Dalam Arsip diharapkan dapat mengawali tumbuhnya gagasan kebangsaan. Melalui materi yang ditampilkan dapat membangun kesadaran anak bangsa bahwa NKRI yang kita nikmati saat ini merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para pendahulu kita. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI perlu ditingkatkan sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan Otonomi Daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah

Daerah. Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program "**Citra Daerah**", yaitu penyerahan hasil alih media dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang akan diserahkan arsipnya pada Tahun 2004 ini adalah Provinsi Lampung.

Arsip Lampung yang akan diserahkan tersebut mencakup kurun waktu dari mulai awal abad 18 sampai dengan abad 20, yakni sejak Zaman VOC, Hindia Belanda sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan ini berisi informasi tentang berbagai interaksi yang terjadi di Lampung pada periode tersebut, yang diharapkan dapat mendorong lahirnya rasa nasionalisme bagi masyarakat Lampung dan memancing peningkatan upaya perluasan khasanah arsip statis yang dimiliki Provinsi Lampung.

Gambaran Sejarah

Provinsi Lampung terletak di ujung selatan pulau Sumatera, dengan batas administratif di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan/tenggara berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara topografis, daerah Lampung dapat dibagi dalam empat unit. Pertama, daerah topografis berbukit sampai bergunung, meliputi Bukit Barisan di sebelah barat dan terus menyusur pantai selatan yang berbukit-

bukit dengan puncaknya terdiri atas Gunung Tenggamus, Gunung Pasawrasan dan Gunung Rajabasa. Kedua, daerah topografis berombak sampai bergelombang, termasuk daerah ini adalah Gedongtataan, Kedaton, Sukoharjo, dan daerah lain yang termasuk wilayah Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Ketiga, daerah dataran alluvial, daerah ini sangat luas hingga mendekati pantai sebelah timur. Keempat, daerah aliran sungai, yang meliputi sungai-sungai Tulangbawang, Seputih, Sekampung, Semangka dan Way Jepara.

Daerah Lampung sebelum datangnya orang-orang Eropa tidak terdapat suatu kesatuan wilayah yang dikuasai oleh seorang raja atau sultan. Sehingga sejarah kerajaan-kerajaan sebagaimana terdapat di tempat lain tidak di kenal di daerah ini. Meskipun tidak terdapat kerajaan, di Lampung terdapat kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang disebut *kebuayan*, yakni suatu kesatuan genealogis yang mendiami daerah-daerah tertentu. Sistem kemasyarakatan ini pada dasarnya sudah dikenal sejak permulaan orang-orang Lampung mendiami dataran tinggi Belalau. Sistem organisasi sosial ini terus berkembang dan tetap diakui hingga agama Islam masuk dan juga sampai masuknya pengaruh Banten.

Lampung yang letaknya berhadapan dengan Banten, di daerah ini Belanda datang untuk pertama kalinya, tentu saja menjadi perhatian Belanda pula, karena Lampung menjadi daerah penghasil rempah-rempah, terutama lada yang sangat terkenal pada saat itu. Lada sebagai komoditas yang penting dan mahal harganya di pasar Eropa, untuk itu daerah Lampung menjadi incaran Belanda, hanya saja Belanda tidak dapat berhubungan langsung dengan penguasa Lampung karena daerah itu berada di bawah pengaruh Banten.

Masuknya pengaruh Banten ke Lampung memang sudah dirintis sejak berdirinya Kesultanan Banten oleh Fatahillah sendiri. Selanjutnya hubungan antara Lampung dan Banten semakin akrab dan berkembang pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk langsung menguasai Lampung, Belanda masih memperhitungkan Kesultanan Banten, dan keinginan Belanda untuk menguasai Lampung untuk sementara waktu dapat diredam setelah permintaan VOC untuk mendirikan benteng di Banten ditolak tegas oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda semakin yakin bahwa untuk menguasai Lampung, Kesultanan Banten harus terlebih dahulu ditaklukkan. Kesempatan ini terbuka ketika di Banten terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkota Sultan Haji. Ketika Sultan Haji berhasil naik tahta atas bantuan Belanda, hanya dalam jangka waktu tiga bulan setelah penobatannya pada tahun 1692, Sultan Haji menandatangani kontrak dengan VOC yang isinya antara lain VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan lada di Lampung.

Setelah Belanda memulai penjajahannya maka pengaruh dari pusat Kerajaan Banten tidaklah begitu banyak terasa lagi di daerah Lampung. Hubungan antara Belanda dan Lampung yang dimulai sejak VOC dan pengaruh hubungan pertama dengan Banten yang kemudian disusul dengan peperangan dan mengadakan kontak-kontak dagang. Akan halnya perlawanan rakyat Lampung terhadap kolonialisme tercatat pada periode selanjutnya. Pada awal abad ke-19 perlawanan terjadi di daerah Abung (Kotabumi) di bawah pimpinan Pangeran Indra Kesuma. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh penguasa Lampung yang diakui oleh pemerintahan masa Daendels yaitu Raden Intan I. Sikap penentangan terhadap Belanda semakin meningkat

semasa kekuasaan Raden Imba II, ia adalah putra Raden Intan I. Perlawanan yang cukup besar terjadi antara tahun 1850-1853 yang dilakukan oleh Raden Intan II, Belanda betul-betul mengalami kesulitan menghadapi perlawanan tokoh yang sangat dimuliakan rakyat Lampung ini.

Gambaran Tentang Pemerintahan dan Situasi Sosial

Dengan bubarnya VOC pada tahun 1799, maka Indonesia langsung menjadi jajahan Belanda. Keadaan ini secara langsung mempengaruhi seluruh wilayah perdagangan Belanda di Nusantara. Begitu juga dengan Lampung, pada tanggal 22 November 1808, Lampung menerima *besluit* yang isinya tidak lagi terikat dengan Banten dan VOC tetapi langsung dibawah Gubernur Jenderal Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sendiri berfungsi menjadi penghubung antara produsen dan pasar, sehingga yang menikmati hasil bumi adalah pemerintah Hindia Belanda, bukan rakyat setempat.

Sebagai akibat perang Eropa pada akhir abad ke-18 yang menyebabkan perdagangan terhalang dan banyak perampok-perampok dengan bantuan Inggris di Bengkulu yang menyebabkan Lampung terasing, maka Lampung harus mengurus dirinya sendiri. Keadaan berubah ketika Inggris berkuasa di Indonesia, daerah Lampung pengaturannya dilakukan melalui residen yang berkedudukan di Banten. Perkembangan selanjutnya pada waktu Indonesia dikembalikan ke tangan Belanda lagi pada tahun 1816, di Lampung diangkat seorang Asisten Residen yang berada di bawah Residen Banten. Pada tahun 1808 Daendels menjadikan Lampung sebagai daerah kekuasaannya. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukannya kemudian didirikan benteng di Tulang Bawang. Pemerintahan

Belanda di Lampung dipegang oleh seorang opsir yang mempunyai kekuasaan sipil dan militer yang disebut **Gezaghebber**. Sesudah tahun 1829 Lampung menjadi daerah yang diperintah oleh seorang Asisten Residen dengan Tarabangi sebagai ibukotanya. Ketika kekuasaan Hindia Belanda mulai mantap maka dilakukan pembagian wilayah administrasi atas Lampung yang terdiri dari enam *afdelingen* dengan ibukota berkedudukan di Teluk Betung.

Bahwa di Lampung pada awalnya tidak terdapat kesatuan wilayah yang dikuasai raja, maka pengaruh yang paling kuat adalah dari Kesultanan Banten, hal ini karena Banten terlebih dahulu berkembang dalam tata pemerintahan, kebudayaan dan ekonomi. Sementara di daerah Lampung bagian utara yaitu sekitar daerah Tulang Bawang terdapat pula pengaruh dari Kesultanan Palembang. Palembang sendiri sejak lama menjadi salah satu bandar lada untuk wilayah Sumatera bagian selatan. Persaingan perdagangan lada ini sempat meningkat menjadi pertikaian antara Banten dan Palembang, bahkan Banten pernah menyerang Palembang pada tahun 1596.

Masuknya pengaruh Banten ke Lampung juga disertai dengan masuknya Islam yang banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Lampung sendiri. Adanya sistem kemasyarakatan terkecil yang disebut **kebuayan** memudahkan Banten menanamkan pengaruhnya ke Lampung. Kedudukan mereka diakui oleh Sultan Banten setelah mereka juga selalu mengadakan kunjungan (*seba*) sebagai tanda takluk kepada Sultan. Selanjutnya kepada para pemimpin kekerabatan itu diberikan **piagam dalung** (tamra prasasti) dan atribut lain seperti siger, kopiah, payung, dan tombak.

Berdasarkan sumber yang ada, di Lampung pernah

mengenal lima sampai enam **keratuan**. Tetapi keratuan-keratuan itu mengakui Banten sebagai penguasa tertinggi. Hal ini dapat dilacak dari **piagam dalung** (tamra prasasti) yang ditulis oleh penguasa Banten untuk mengatur daerah Lampung. Untuk mengakui hak atas tanah pada masa itu, para **umpu** yang memimpin **kebuayan** bermufakat untuk mengakui hanya ada lima keratuan yang berhak atas tanah dan pemerintahan kebuayan di seluruh Lampung. Lima keratuan ini masing-masing dipimpin oleh para ratu atau umpu yang dipilih berdasarkan asas **primus inter pares**. Kelima keratuan itu adalah: Keratuan Ratu di Puncak, Keratuan Ratu di Balau, Keratuan Ratu di Pemanggilan, Keratuan Ratu di Pugung dan Keratuan Ratu Darah Putih. Dari lima keratuan ini yang bulat kesatuan kebuayannya adalah Abung Sewo Meguo (Abung sembilan marga). Disamping masyarakat Lampung yang tersebut di atas, terdapat pula masyarakat Lampung yang dikenal dengan **Lampung peminggir** yaitu masyarakat yang mendiami daerah Lampung Barat (Krui), Ranau, Rajabasa (Kalianda), dan Teluk Betung.

Penduduk Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa, penduduk asli Lampung terdiri dari suku Lampung, Rawas, Melayu, Pasemah dan Samendo, sedangkan yang berasal dari luar daerah (pendatang) adalah Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Batak, Ogan, Bugis, Banjar dan Maluku. Berkumpulnya berbagai macam suku bangsa di Lampung, bukan hanya karena daerah ini merupakan lokasi transmigrasi (yang pada awalnya disebut kolonisasi) tertua sejak jaman penjajahan Belanda, tetapi juga karena letaknya sebagai daerah penghubung antara Sumatera dan Pulau Jawa. Faktor lain adalah daerah Lampung yang tanahnya subur merupakan daya tarik bagi pendatang terutama dari Pulau Jawa dan daerah lain di Pulau Sumatera. Migrasi

penduduk secara intensif terjadi dari daerah Banten sejak masa pemerintahan Sultan Fatahillah dari Kesultanan Banten. Pada jaman Belanda, pemerintah Belanda untuk pertama kali melakukan pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung dengan sebutan *Kolonisasi*. Pada tahun 1905 dipindahkan penduduk dengan tujuan Gedongtataan, kemudian tahun 1907 ke Karang Anyar, tahun 1908 ke Purworedjo, tahun 1910 ke Wonodadi, Purwosari dan ke Tegalsari, tahun 1912 ke Wonokrio, tahun 1913 ke Tambakrejo, tahun 1922 ke Wonosobo dan tahun 1935 ke Way Sekarnpung.

Jumlah penduduk Lampung pada tahun 1905 sebanyak 115.518 jiwa dan pada tahun 1930 berjumlah 361.563 jiwa. Hasil sensus tahun 1961 tercatat penduduk Lampung berjumlah 1.667,511 jiwa, sepuluh tahun kemudian melalui hasil sensus tahun 1971 jumlah penduduk Lampung meningkat menjadi 4,6 juta jiwa.

Masa Indonesia Merdeka

Sebelum kemerdekaan daerah Lampung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, karena itu sejarah pergerakan dan perjuangan di daerah Lampung berhubungan erat dengan sejarah perjuangan di provinsi itu. Pada awal kemerdekaan, Lampung berkedudukan sebagai sebuah karesidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai Residen Lampung pertama ditunjuk Mr. Abbas. Karena dalam situasi pergolakan maka seperti halnya di daerah lain pemerintahan di Lampung tidak dapat berjalan lancar. Di Lampung segera setelah para pemuda mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Selain itu juga dibentuk organisasi kemiliteran, yakni

Pasukan Keamanan Rakyat dan Laskar Bersenjata lainnya untuk mengambil alih instansi pemerintahan yang semula dikuasai Jepang. Untuk membenahi masalah pertahanan di daerah Lampung selanjutnya dibentuk sebuah resimen dengan komandannya Letkol Iwan Supardi.

Pergolakan-pergolakan yang terjadi pada masa revolusi juga melanda daerah Lampung, akibatnya kepemimpinan pemerintahan Residen Lampung tidak stabil. Pada bulan September 1946 Residen Mr. Abbas dipaksa untuk meletakkan jabatannya oleh sebuah badan yang menamakan dirinya Panitia Perbaikan Masyarakat (PPM). Sebagai gantinya Residen Lampung dipegang oleh Dr. Barel Munir, tetapi ini juga tidak berlangsung lama, maka pada akhir tahun 1947 ia digantikan oleh Rukadi. Sementara Belanda yang ingin kembali berkuasa, pada tahun 1948 berhasil menduduki ibukota Karesidenan Lampung, oleh sebab itu pemerintahan dipindahkan ke Menggala. Mengenai pemindahan ini sering terjadi perdebatan di antara tokoh-tokoh perjuangan di daerah itu. Misalnya pada tahun 1948 terjadi penolakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Karesidenan, yang kemudian mengangkat Mr. Gele Harun sebagai Kepala Pemerintahan Darurat Karesidenan Lampung.

Setelah Pengakuan Kedaulatan, di Lampung juga terjadi pengalihan kekuasaan yang diterima oleh Residen Lampung Mr. Gele Harun. Sama seperti di daerah lainnya di Indonesia setelah pengalihan kekuasaan itu muncul tuntutan untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan. Dan pada waktu yang sama masyarakat di Kawedanan Krui yang sebelumnya masuk daerah Karesidenan Bengkulu, mengadakan peblisit dan memilih menjadi bagian dari Karesidenan Lampung, dengan demikian luas wilayah Lampung semakin bertambah. Dengan pemikiran

agar pembangunan di daerah Lampung semakin cepat berkembang, maka pemerintah meningkatkan status daerah ini menjadi provinsi. Provinsi Lampung dibentuk tanggal 18 Maret 1964 dengan Perpu No. 3/64 yang kemudian menjadi Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964, dengan gubernurnya yang pertama Kusno Danu Upoyo.

Materi Arsip Yang Ditampilkan Dalam Citra Daerah Provinsi Lampung

Dalam Citra Daerah Lampung ini penampilan materi dimulai dengan mengetengahkan *kondisi geografis daerah Lampung*. Batas wilayah geografis yang ada pada masa awal yang berangka tahun 1793 berasal dari koleksi Arsip Banten tentang kontrak antara Kerajaan Banten dengan Kerajaan Palembang tentang pembagian daerah Lampung dan Palembang. Arsip kartografik menggambarkan wilayah Teluk Betung, wilayah pesisir Lampung dan wilayah lain sampai Sumatera bagian selatan. Koleksi foto juga melengkapi penggambaran secara geografis baik daerah gunung maupun pantai beserta bangunan-bangunannya, terutama pantai Teluk Betung, Gunung Rajabasa hingga wilayah Krakatau.

Tema *pemerintahan* digambarkan oleh materi arsip yang menyebutkan Lampung pernah menjadi wilayah yang berdiri sendiri pada tahun 1752. Sedangkan untuk masa kontemporer digambarkan dengan Laporan Pembangunan Provinsi Lampung tahun 1977 yang diambil dari koleksi Arsip Sekretariat Wakil Presiden Hamengku Buwono IX. Selebihnya digambarkan melalui foto-foto mengenai gedung kantor pemerintahan dan rumah jabatan (Kantor dan Rumah Residen serta Rumah Administratur) sekitar tahun 1930-an.

Berbicara mengenai daerah Lampung kita tidak bisa lepas dari *sejarah transmigrasi* yang saat itu lebih populer dengan sebutan *kolonisasi*. Mengenai usaha pemindahan penduduk ini bisa diamati lewat foto-foto dari koleksi *Koninklijk Indische Voor Tropen* (KIT). Foto-foto ini menunjukkan usaha pembangunan prasarana dalam rangka kolonisasi maupun kegiatan pembukaan hutan, pembangunan pemukiman beserta penghuninya. Laporan-laporan tertulis maupun laporan ikhtisar statistik ikut melengkapi data-data tentang perpindahan penduduk baik masa kolonial maupun masa Indonesia Merdeka. Persoalan yang muncul sekitar pelaksanaan transmigrasi dan kunjungan pejabat ke daerah transmigrasi di Lampung pada periode tahun 1950-an juga ditampilkan.

Sektor *pendidikan* diwakili oleh adanya laporan sekolah umum Pribumi tahun 1898 dan laporan pendidikan di Lampung tahun 1968. Sedangkan perkembangan *kebudayaan* banyak ditampilkan melalui foto-foto koleksi KIT yang mencakup pakaian adat, kostum tarian, baju pengantin dan foto-foto hasil tenunan khas Lampung.

Sebagai daerah agraris Lampung juga mempunyai sarana *irigasi* maupun bendungan untuk keperluan pengairan. Untuk melihat ini semua bisa diamati lewat arsip foto dari koleksi Kementerian Penerangan dan KIT. Kondisi sebagai daerah agraris juga menempatkan Lampung sebagai daerah *perkebunan* yang cukup potensial. Disini terdapat laporan mengenai perkebunan beberapa komoditas yang dikembangkan di daerah Lampung, seperti lada, kopi, karet dan tanaman jagung di ladang.

Sektor *perindustrian*, selain menyangkut industri pangan seperti tapioka, garam juga pabrik tali, tekstil, kayu dan tegel. Kemudian disambung dengan materi mengenai proses penuaian,

pengolahan dan pengumpulan komoditas hasil bumi termasuk hasil laut melalui usaha penangkapan ikan. Sektor lain yang ditampilkan adalah *pertambangan* seperti batu bara, emas, perak lewat foto-foto koleksi KIT.

Sektor *perhubungan* yang ditampilkan mengenai pembangunan jalan, jembatan pada awal abad ke-20 diambil dari arsip foto. Pada masa Indonesia Merdeka, yakni awal tahun 1950-an pembangunan jalan dan jembatan giat dilaksanakan di daerah Lampung, hal ini bisa dilihat dari foto-foto koleksi Kementerian Penerangan.

Kegiatan *perdagangan* di Lampung bisa kita amati dari catatan tentang perdagangan lada tahun 1787. Kemudian foto tentang usaha koperasi, juga tentang situasi dan pemandangan pasar di beberapa kota di Lampung bisa dilihat dari foto koleksi Kementerian Penerangan. Menutup Citra Daerah adalah ditampilkannya tema *agama* digambarkan lewat tempat peribadatan, yakni foto bangunan Masjid dan Gereja di Tanjung Karang.

Daftar Pustaka

Arsip Nasional RI.

1977 *Inventaris Arsip Lampung*. Jakarta.

Cribb, Robert.

2000 *Historical Atlas of Indonesia*. London-Singapore:
Curzon Press and New Asia Library.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

1978 *Sejarah Daerah Lampung*. Jakarta.

1984 *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme
dan Kolonialisme Di Daerah Lampung*. Jakarta.

Departemen Penerangan RI.

1950 *Provinsi Sumatera Selatan*. Jakarta.

Departemen Transmigrasi RI.

1995 *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi*. Jakarta.

Mahruf, Kamil, Nanang S. Soetadji, Djohan Hanfiah.

1999 *Pasemah Sindang Merdeka 1821 - 1866*.
Palembang: Paguyuban Masyarakat Musi.

Martinus Nijhoff.

1917 *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*. Leiden,
s'Gravenhage.

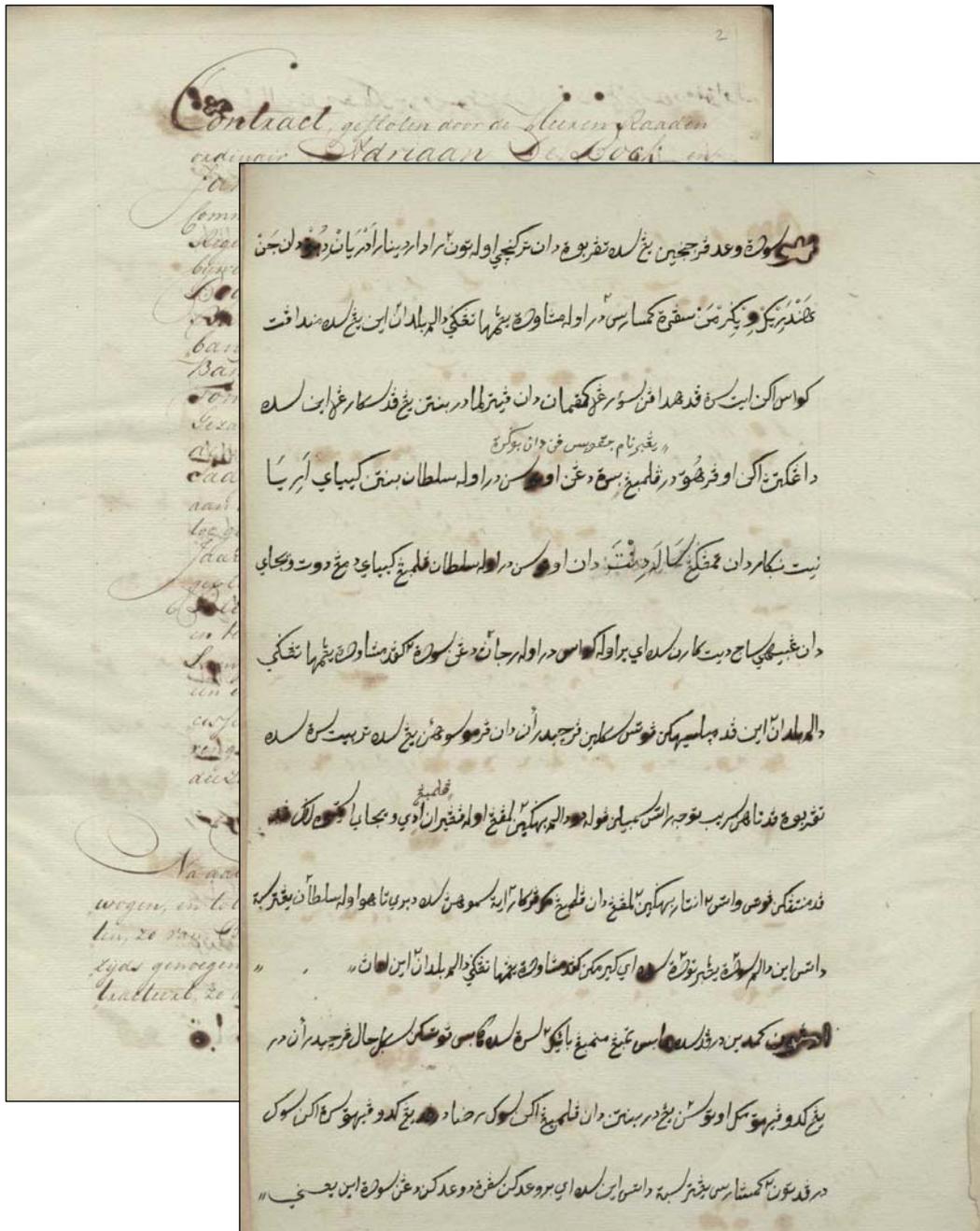
Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie, 1870-1940.

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

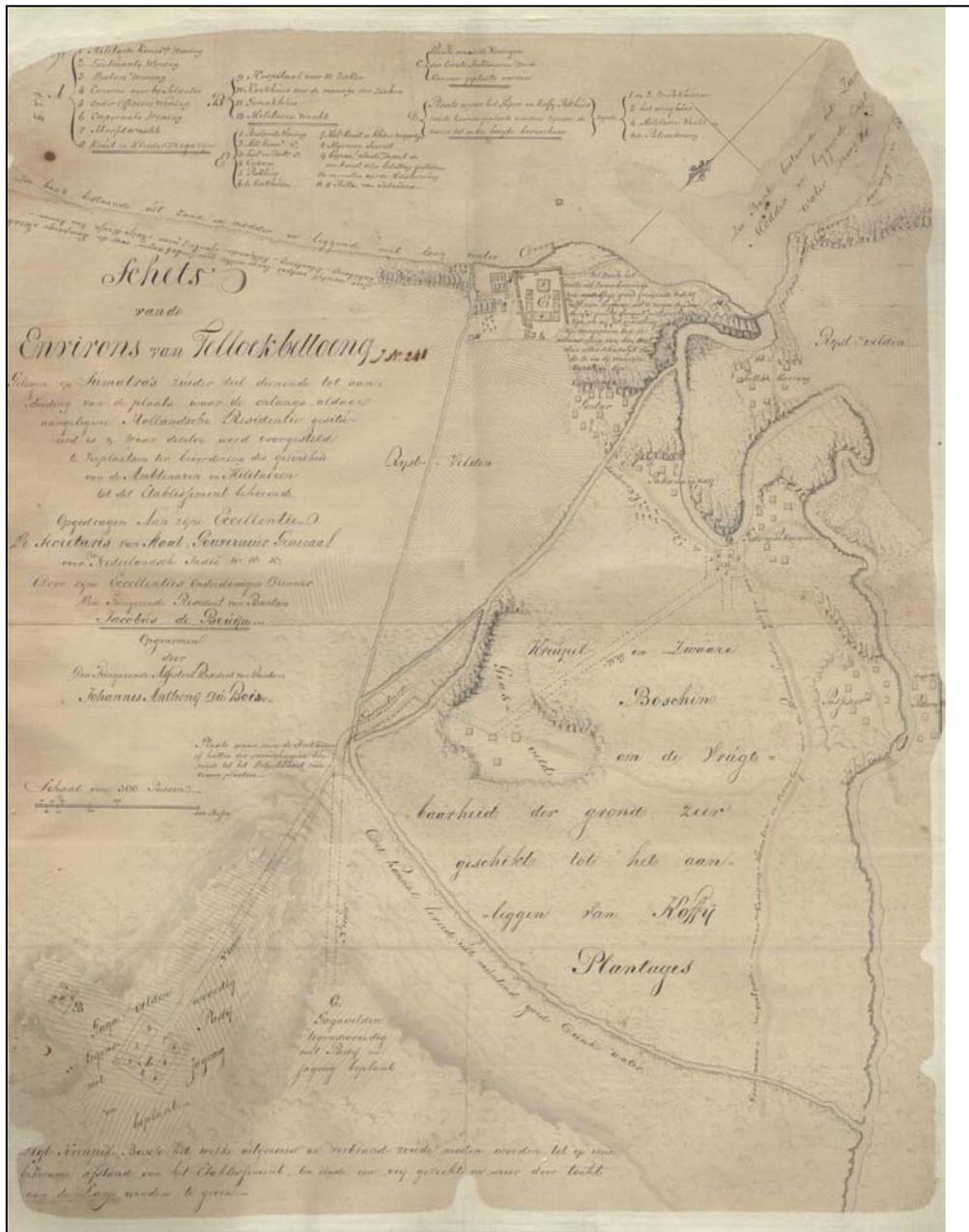
1992 *Profil Provinsi RI: Lampung*. Jakarta.

CITRA LAMPUNG DALAM ARSIP

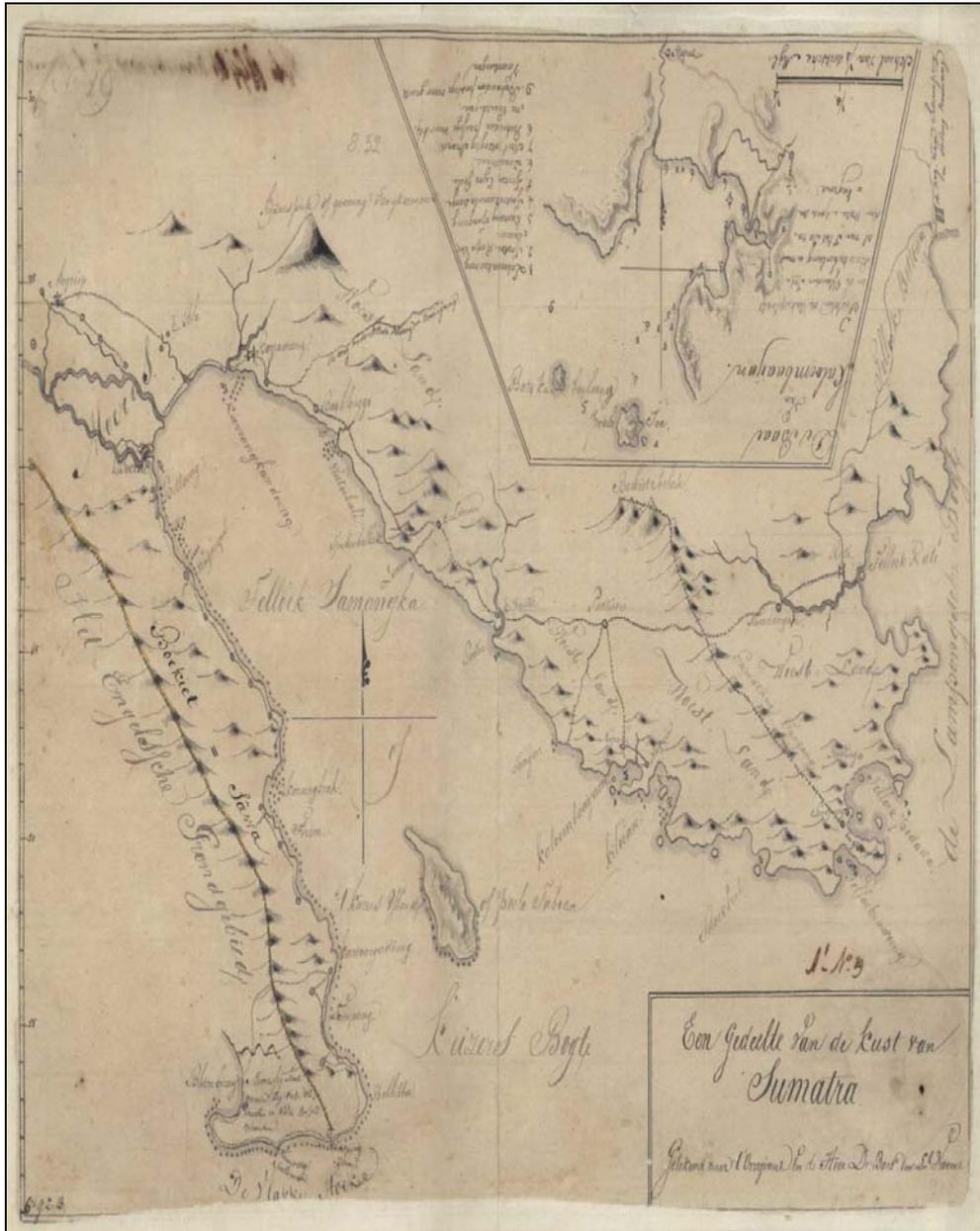
GEOGRAFI



Kontrak antara Kerajaan Banten dengan Kerajaan Palembang tentang ketentuan pembagian daerah Lampung dan Palembang. (Bahasa Belanda dan Arab Melayu), 18 Desember 1793
Banten 78



Sketsa dari wilayah Teluk Betung.
De Haan E. 73



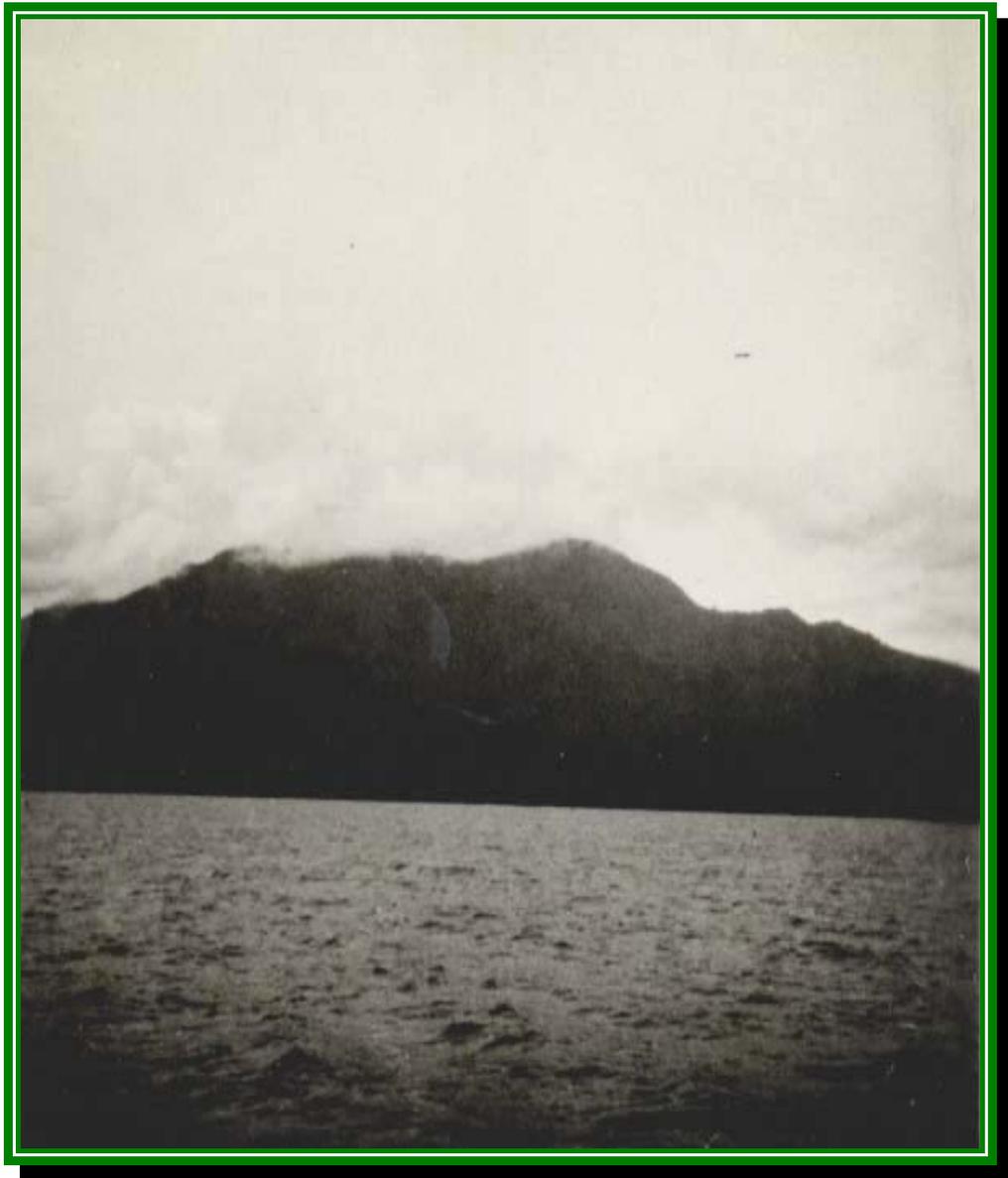
Peta pesisir Lampung (sebagian dari Pantai Sumatera bagian selatan)
De Haan B.52



Peta pantai Lampung dan daerah sekitarnya bagian dari Sumatera bagian selatan
De Haan H.9

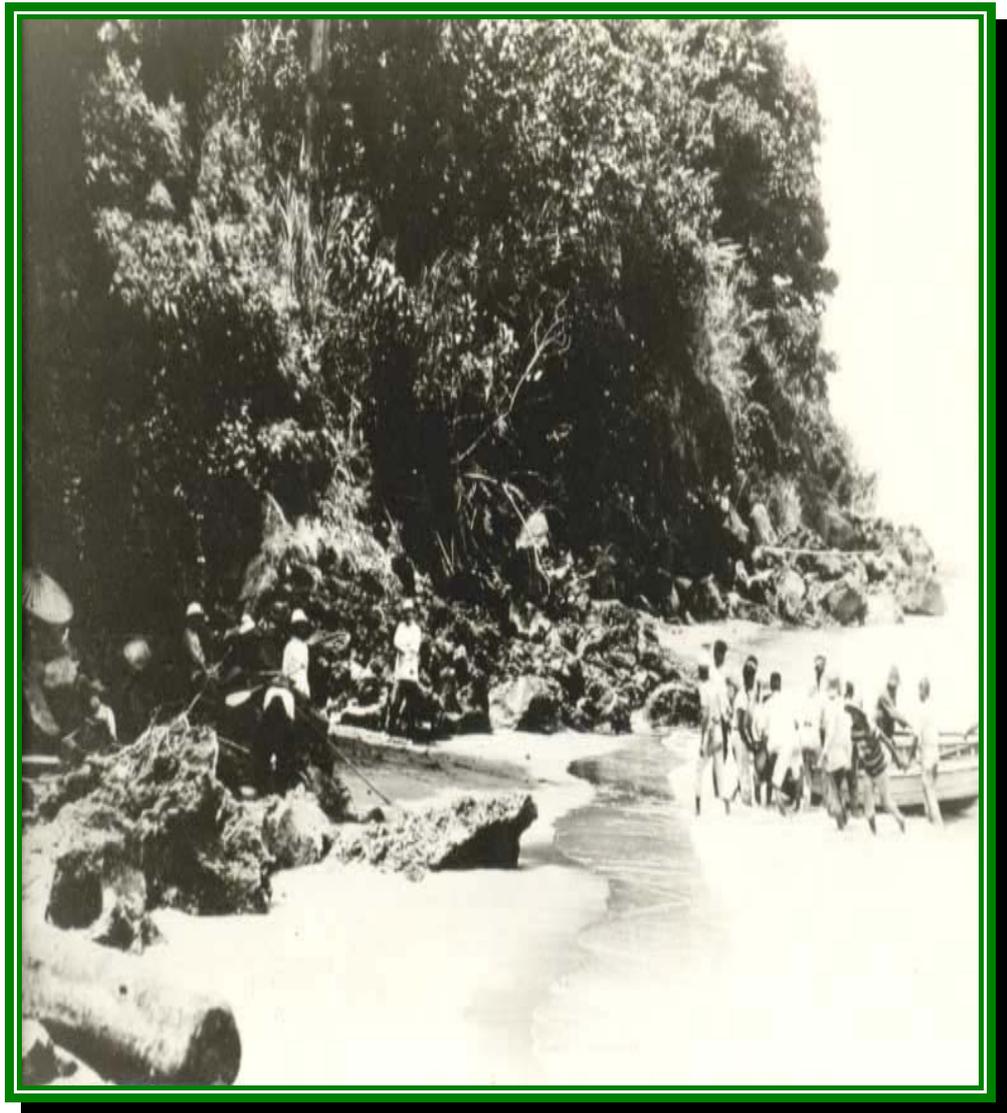


Foto udara Kotabumi, Lampung.
KIT NO. 0755/069



Gunung dan laut Rajabasa, Lampung.

KIT NO. 0953/031



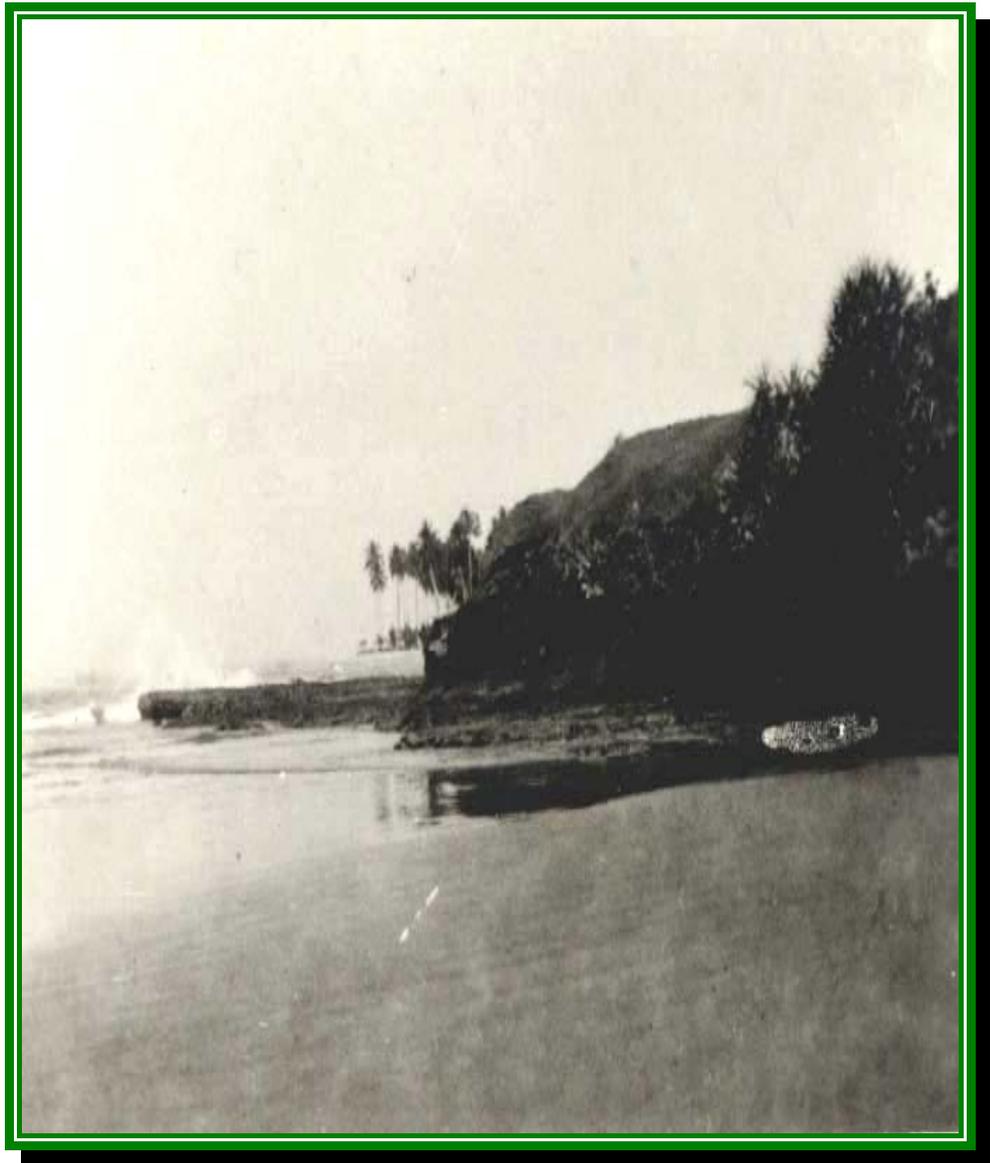
Krakatau, daerah tempat orang-orang melabuhkan kapalnya, Lampung.

KIT NO. 0973/063



Foto udara Pantai Teluk Betung dengan bangunan-bangunannya,
Lampung.

KIT NO. 0973/076



Gunung Karang di Pantai Panjang, Lampung.
KIT NO. 0973/090



Sungai Kuripan yang dipergunakan untuk Dam 45, Teluk Betung,
Lampung.

KIT NO. 0047/012



Sungai/mata air di Wai Ngaras, Krui, Lampung.
KIT NO. 0935/021

PEMERINTAHAN

en meerdere dienaren, met die rigeur worde behandeld en afgedaan, dat andere vorsten en inlanders, aan het Hollandsch gouvernement onderworpen of van dies protectie gebruik makende, daaraan voor altoos een exempel hebben, heeft besloten:

- 1^o het koninkrijk Bantam te verklaren tot domein van Zijne Majesteit den Koning van Holland ten einde over hetzelfde zoodanig te beschikken en te disponeeren, als tot welvaart van land en volk en overeenkomstig het belang van den Lande zal bevonden worden te behooren;
- 2^o den tegenwoordigen kroonprins, Pangerang Ratoe Alie Oedien, uit consideratie voor het oude stamhuis der Bantamsche vorsten te benoemen tot Sulthan van Bantam, onder zoodanige bepalingen en restrictien, als bij een daarvoor te formeeren instructie en eed, alsmede bij het reglement, op het bestier van deze prefecture te ontwerpen, zullen worden geëxpliceerd;
- 3^o de Lampongsche provincien en alle de daar gevonden wordende havens aan het bestier van den Koning van Bantam te onttrekken en onder het direct oppergezach en beheering van het Hollandsche gouvernement te nemen; en
- 4^o het Oostelijke gedeelte van het Bantamsche rijk, hetwelk door den Sulthan aan Chineezen is verhuurd geworden, loopende van het regentschap Tangerang langs de rivier Tjidanie tot 300 roeden over de rivier Tjimantjerie, zoodmede de districten Sading en Jessingen, als afgezonderd van het Bantamsche rijk te verklaren en dezelve met de ommelanden van Batavia te vereenigen.

In 1752 waren de Lampongs door de Indische Regering als leen aan den Sultan van Bantam afgestaan.

22 November. *Aanstelling van een prefect van Bantam.*

Deze, — een oud-eerste secretaris van de Regering — kreeg, met behoud van zijnen rang en pensioen, voorloopig een daggeld van 20 rijksdaalders, zilver geld.

Pengumuman tentang pengembalian daerah Lampung menjadi provinsi tersendiri setelah tahun 1752 dipinjamkan kepada Sultan Banten.

November 1808

Plakaatboek Jilid XV Hal.355



Rumah Administratur di Tanjung Karang, Lampung. November 1897
KIT NO. 0110/010

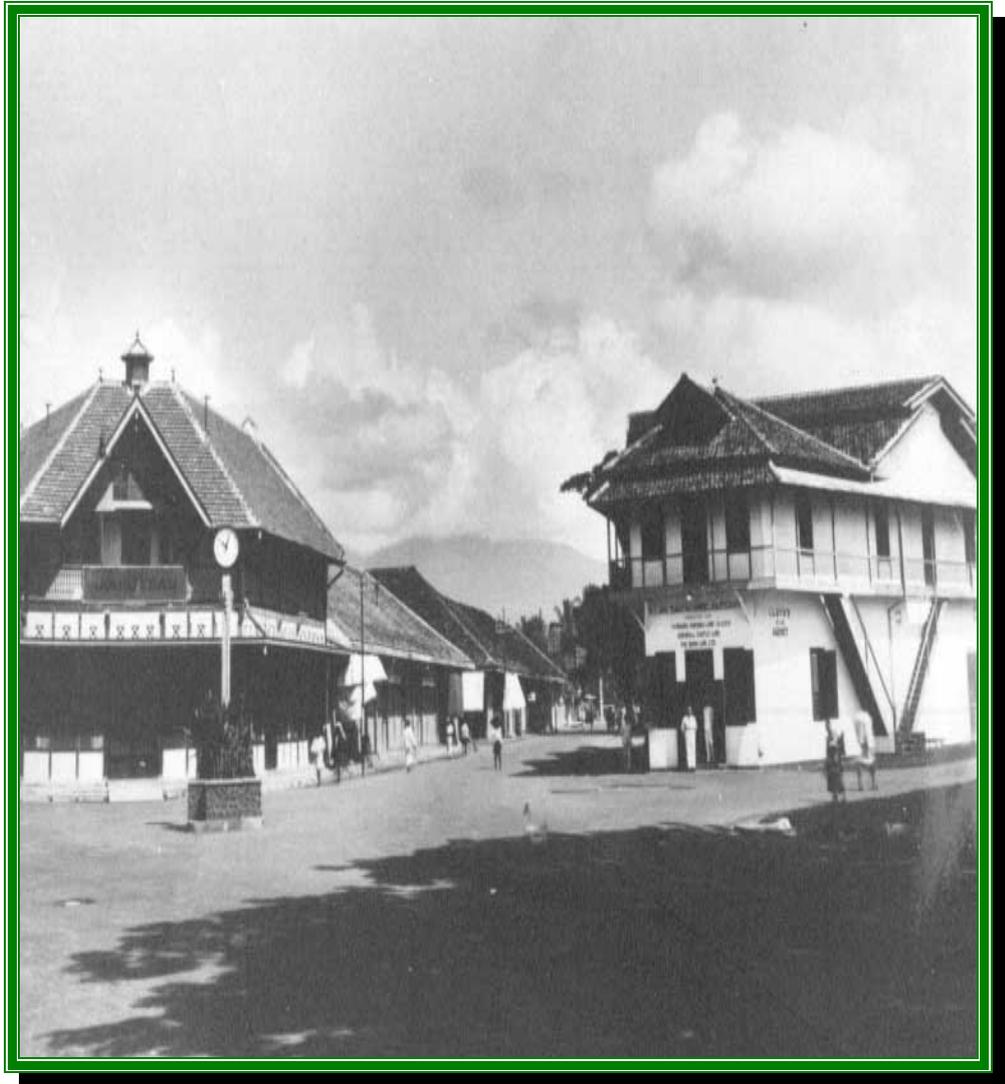


Kantor Residen Lampung, 1903 – 1933.
KIT NO. 0111/042



Pemuda/pemudi berpakaian daerah dan masyarakat ketika menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Mr.Fock di Teluk Betung, Lampung.
1921

KIT NO. 0140/037



Perkantoran di persimpangan jalan, Lampung. 1930
KIT NO. 0111/046



Rumah Residen bergaya Belanda, Lampung, 1930.
KIT NO. 0111/044

b3. Loka karya u d k. P.

Baik loka karya tingkat Propinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan selalu dilaksanakan untuk membicarakan pelaksanaan

b4. Penyusunan "SELEKSI Desa" proses

Konsep.

b5. Visual kursus dalam

I. Pendahuluan.

Propinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang2 No. 14 tahun 1964, yang tadinya Propinsi tersebut merupakan salah satu wilayah dari Propinsi Sumatera Selatan. Sejak berdirinya hingga sekarang Propinsi Lampung terdiri dari 1 kotamadya dan 3 kabupaten, 71 kecamatan dan 1.446 desa. Tingkat perkembangan desa tahun 1976/1977 adalah sbb :

- (1) Desa Swadaya = 673 buah
- (2) Desa Swakarya = 693 buah
- (3) Desa Swasembada = 80 buah

Jumlah = 1446 buah

Luas wilayah 35.376,50 km² dan jumlah penduduk 3.129.730 orang yang terpadat kita dapati di Kabupaten Lampung Selatan yaitu dengan luas wilayah 6.705,98 km² dihuni oleh 1.218.700 orang sedang di kabupaten Lampung Utara terjadi sebaliknya yaitu dengan luas wilayah 19.308,50 km² hanya dihuni oleh 577.073 orang. Pendapatan perkapita/income perkapita masyarakat Desa masih rendah, + Rp 10.500 = + \$ 40,- malahan ada yang masih berpenghasilan Rp 5.389,07 = \$ 12.99. Dengan meninjau keempat unsur pokok yaitu; jumlah desa, tingkat perkembangan desa, luas wilayah dan pendapatan perkapita yang ada di Propinsi Lampung dapat merupakan titik tolak dalam mengikuti perkembangan desa yang nampaknya sudah semakin menunjukkan kemajuan.

II. Unit Daerah kerja Pembangunan.

(1) Unit daerah kerja Pembangunan adalah suatu sistim pelaksanaan Pembangunan desa yang digunakan dalam mempercepat tingkat pengembangan desa dan wilayah kecamatan karena merupakan kesatuan wilayah yang terendah dijadikan sebagai "pusat pengembangan" (growth centre) desa2.

(2) Pembentukan udk. P. berdasarkan perkembangan a.l. :

- a. Pembangunan desa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu desa.
- b. Pembangunan desa merupakan satu kesatuan dan ketulutan dengan pembangunan daerah, dimana kecamatan dijadikan merupakan pengembangan wilayah yang terkecil.
- c. Desa tidak dapat berkembang secara maksimal tanpa adanya pusat pengembangan dan pusat pengembangan tsb. ada dikota kecamatan, yang memiliki fasilitas pengembangan serta ditunjang oleh daerah pedesaan sekitarnya sebagai pendukung.

(3) Pelaksanaannya di Propinsi Lampung.

- a. Sejak Pelita I hingga sekarang ini (tahun kedua Pelita II) dari 71 kecamatan telah terbentuk 12 buah kecamatan udk.P. yang tersebar diseluruh Propinsi Lampung.
- b. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan .
 - b1. Telah dilaksanakan penelitian tata desa untuk seluruh desa dalam 4 wilayah kecamatan (kecamatan Talang Padang, k. Paradatus, k. way. Jepara dan k. Penengahan) yang dilakukan tahun 1975.
 - b2. Telah dilaksanakan juga pemetaan desa dan macamnya peta tsb. adalah :
 - b2. 1. Peta administrasi.
 - b2. 2. Peta bangunan jalanan
 - b2. 3. Peta potensi desa
 - b2. 4. Peta pengembangan desa.
 - b2.5 Peta Land use
 - b2. 6. Peta topografi

b. 3.....2

Laporan mengenai pembangunan Provinsi Lampung. 1977
Setwapres Hamengkubuwono IX 523

TRANSMIGRASI



Pembukaan lahan untuk jalan kolonisasi, Lampung.

KIT NO. 0315/010



Mesin traktor untuk membuka ladang di Bekri, Lampung.
KIT NO. 0555/010



Bajak tanah dengan traktor di daerah transmigrasi, Lampung. 1952
KIT NO. 0141/071



Pembukaan hutan dengan menggunakan traktor yang dikerjakan oleh
N.V. Sukadana, di Lampung. 29 Juni 1955
Kempen No.K550629 DD3-1



Pembangunan rumah-rumah untuk anggota Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) Lampung yang dikerjakan bergotong royong oleh anggota BRN di Way Petai, Lampung Utara. 26 Juni 1952

Kempen No.520626 DD-36



Pembukaan tanah dengan traktor-traktor untuk persediaan
perkampungan transmigrasi di Lampung. 22 Juni 1955
Kempen No.K550629 DD-6



Pendaftaran/registrasi para transmigran, Lampung.
KIT No.0315/032



Pemberian kartu bukti diri kepada para transmigran, Lampung.
KIT NO. 0314/082



Para Kolonisten menerima pembagian bibit tanaman, Lampung.
KIT NO. 0314/032

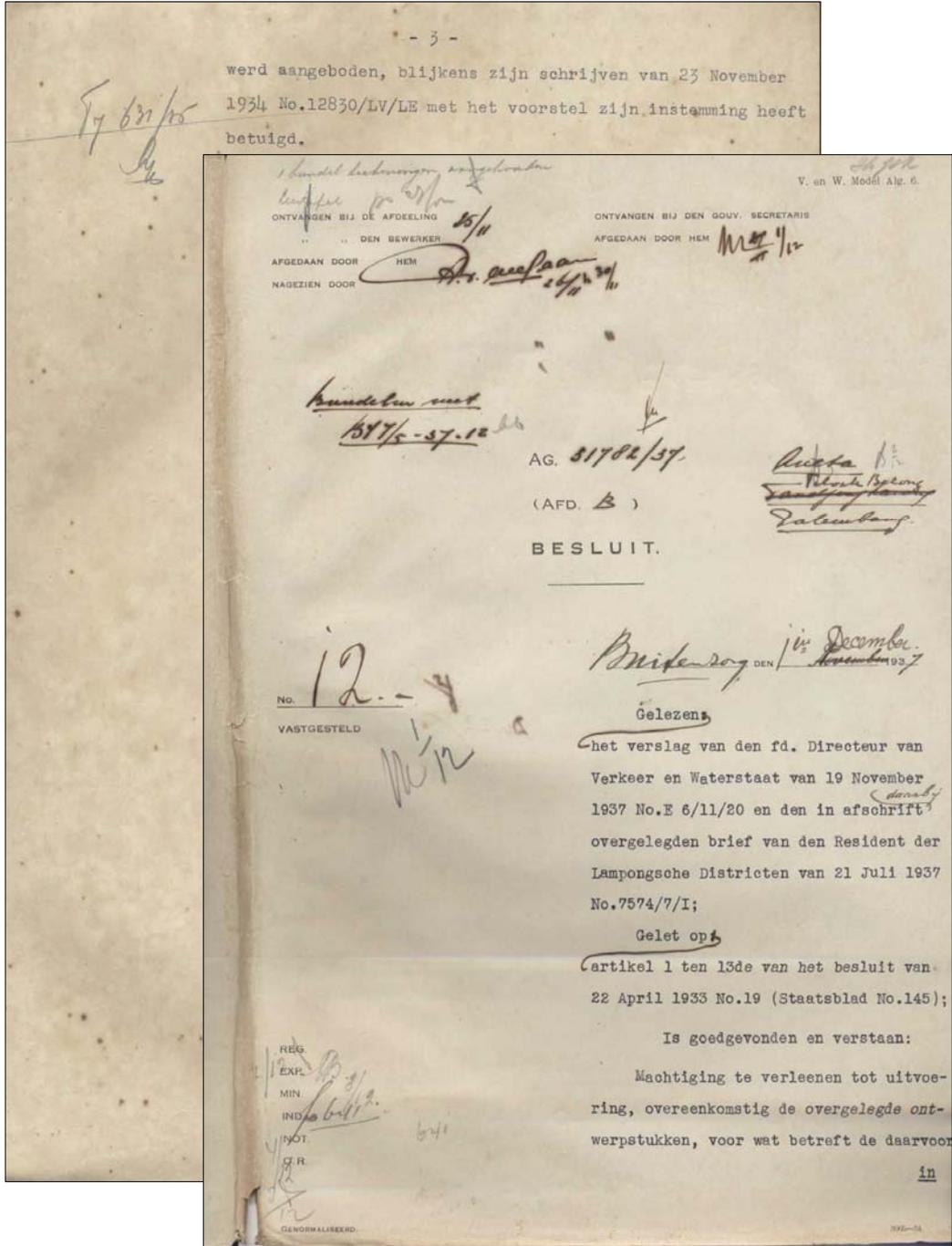


Para transmigrasi menerima pembagian peralatan pertanian, Lampung.

KIT NO. 0315/014



Perkampungan kolonisasi pertama, Lampung.
KIT NO. 0315/012



Besluit No.12 tentang pembuatan Way Sekampoenng bagian VI di Keresidenan Lampung Desember 1937
Algemeene secretarie Ag.51782/37



Rumah-rumah pribadi, Lampung, 1930
KIT NO. 0111/052

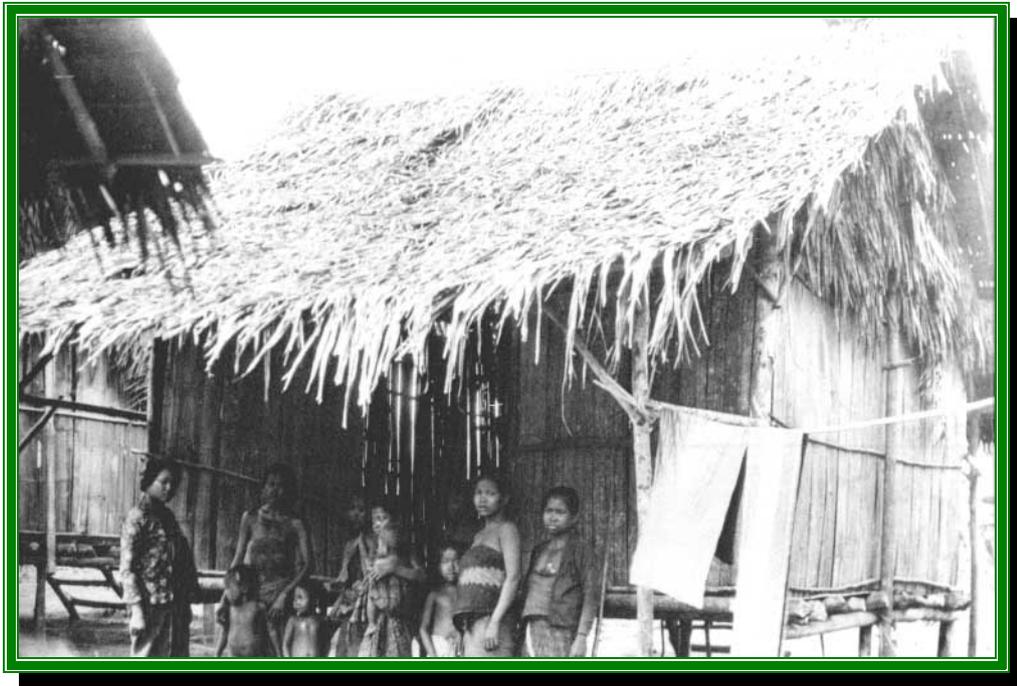


Kolonis Tabri bersama keluarga, Lampung.
KIT NO. 0314/034



Kompleks perumahan kolonisasi tempat kerja pabrik di Rambutan,
Lampung.

KIT NO. 0314/044



Perumahan transmigran Jawa dan Penduduk masa kolonisasi,
Lampung. Mei 1921
KIT NO. 0047/016



Perumahan para kolonisasi di Lampung milik Senembah Mij, Lampung.
KIT NO. 0314/052

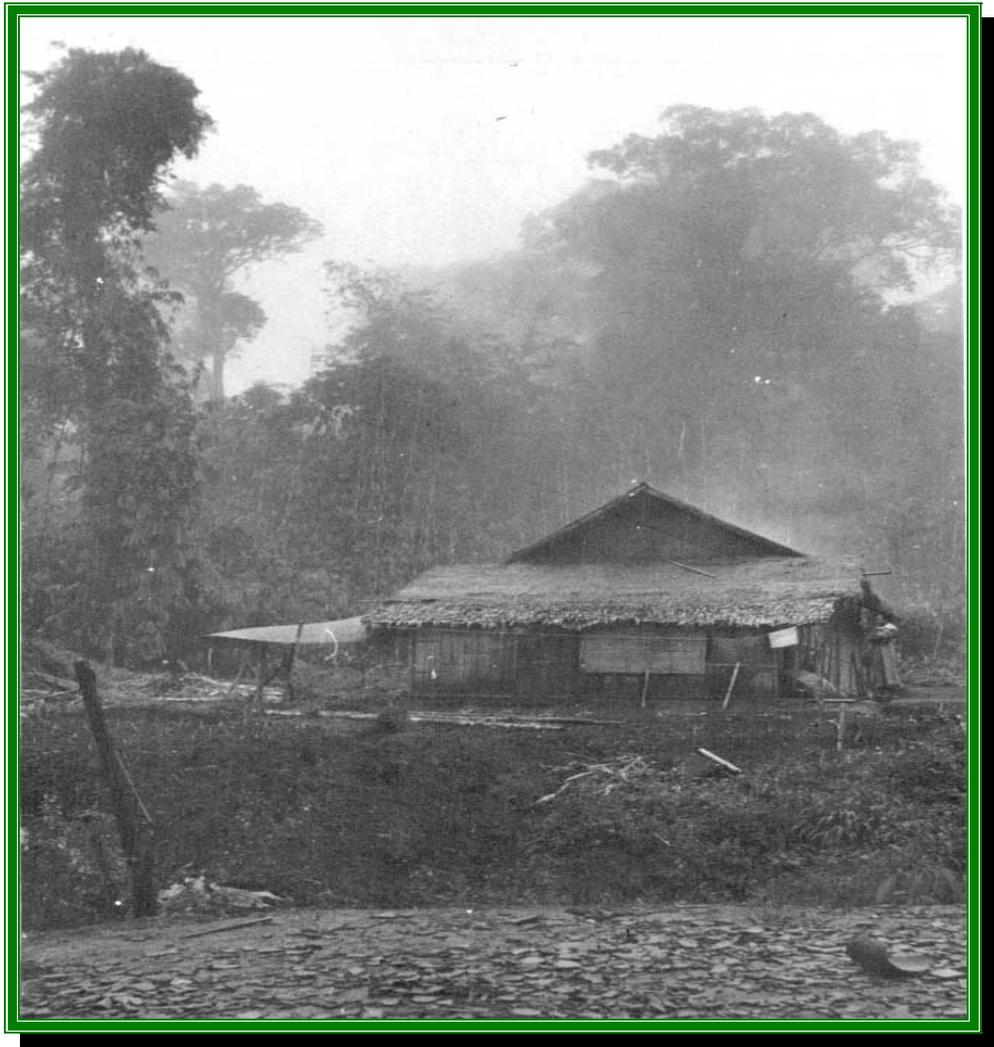


Salah satu bangun gudang di Kolonisasi Bandar Slamat Vinder Speelhims,
Lampung.

KIT NO. 0314/046



Keluarga Indonesia, Transmigran berasal dari Jawa di Tanjung Karang,
Lampung. 25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-31



Rumah darurat anggota BRN di Way Petai. 28 Juni 1952
Kempen No. K520628 DD-9

CENTRALE COMMISSIE VOOR MIGRATIE EN KOLONISATIE
VAN INHEEMSCHEN

A a n
den Gouverneur van
te

ke de Vries

No. 3346/XII

BATAVIA, 10 November 1942

Bijla
Onder
Javaa
nisat

-AND-

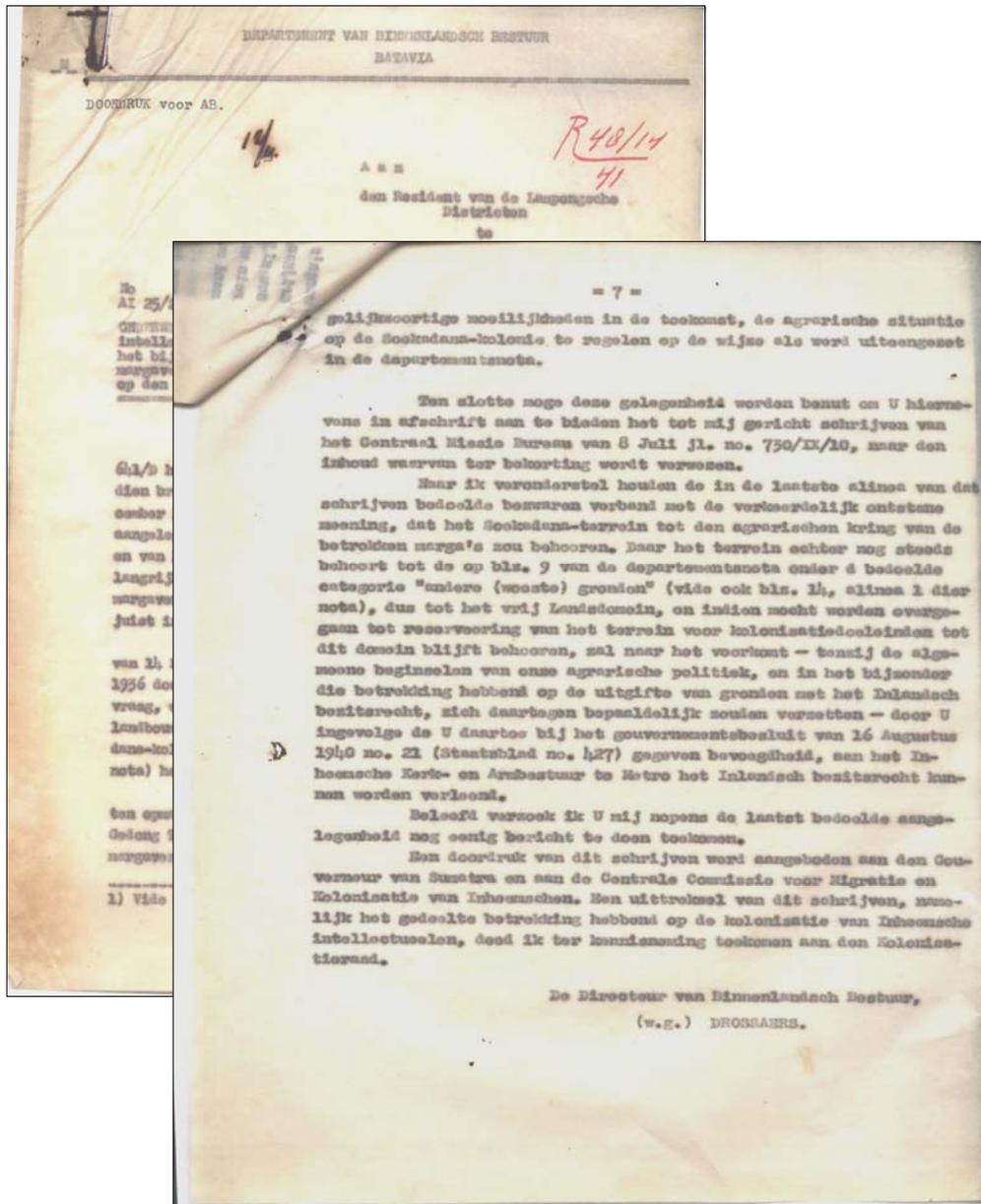
ke de Vries

1. 0 de mede 2. 2 Commissi aantal g terreine langrijk doworkin en 1940 Java naa jaren op 3. D gen, dat het door thans na gezinnen Dit resu belanget tiowerk inspanni		Batahan	Senkoelen	L.Linggau	D j a m b i	Langkane Districten	Belitung	Totaal	Vertrokken in 1941
		medio Dec. 1941	eerste helft Jan. 1942	eerste helft Jan. 1942				1942 Sumatra	
	Gheriben	-	-	-	-	200 eind Januari	-	200	182
	Sehalongan	-	-	-	200 begin Jan.	500 begin Februari	100 tweede helft Mt.	800	746
	Hanjenas	-	100	-	-	900 eerste helft Febr.	200	1800	1627
	Hede	-	-	-	100 medio Jan.	1900 medio Februari	500 eerste helft Apr.	2000	1879
	Imarang	-	-	-	-	600 tweede helft Febr.	-	600	515
	Jav. Bantang	-	-	-	-	100	-	100	366
	Teiloen	-	-	100	-	500 tweede helft Mt.	-	700	66
	Teljanepore	-	-	-	-	200	-	200	111
	Sourabaya	-	-	-	-	100	100 eerste helft Apr.	500	130
	Medi	500 ¹⁾	-	-	100 eind Jan.	1200 begin April	600 eind Febr., late h.lft.	2500	2025
	Sukra	-	-	-	-	500 eind Maart	-	500	360
	Soekarta	-	100	-	-	900 begin Maart	500 tweede helft Apr.	1500	1112
	Sourabaya	-	-	200	-	1100 medio Maart	500	1700	1001
	Totaal	600	200	300	1000	5000 voor 3500 gez.	1900 voor 1250 gez.	15000 voor 12750 gez.	12050

excl. Senkoelen

1) Brief C.L.C. van 11 Oct. 1941 No. 3125/XII.
2) w.o. 500 gez. voor afname kerr. H. Sepotih.

Surat dari Centrale Commissie voor Migratie en Kolonisatie van Inheemschen Batavia tentang kolonisasi pertanian orang-orang Jawa, 1942
Binnenlands Bestuur 580



Surat dari Directeur van Binnenlandsch Bestuur kepada Resident van de Lampongsch Districten di Tandjoeng Karang tentang kolonie dari orang-orang intelektual Pribumi di Koloni Sukadana yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah Marga. 8 November 1942

Binnenlands Bestuur 1227

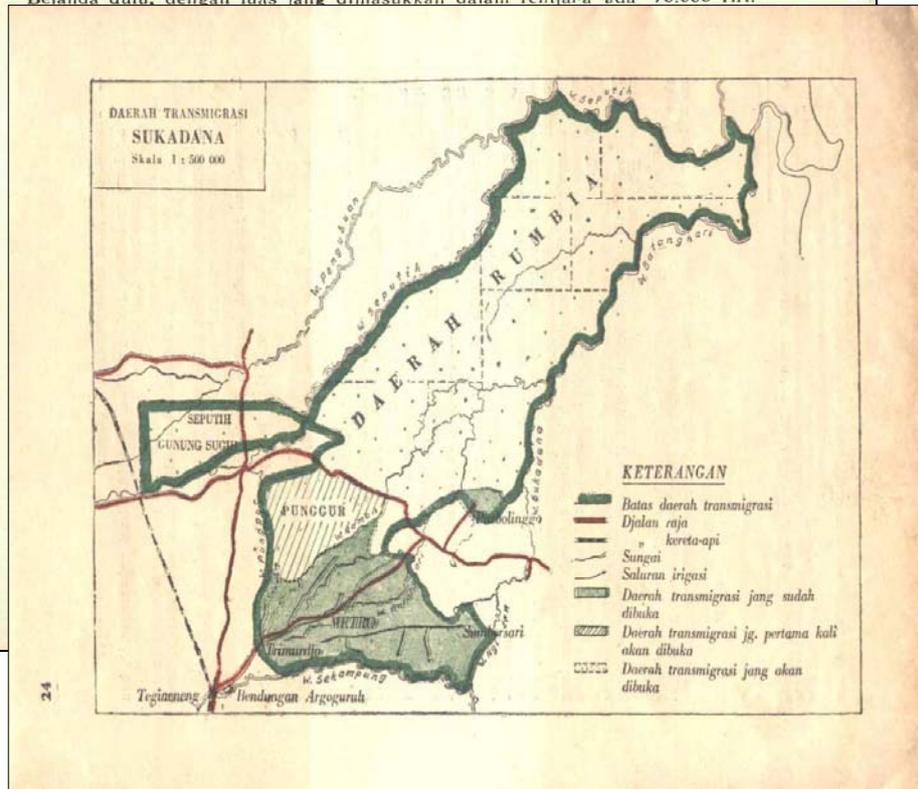
V. KARANGAN.

SUKADANA

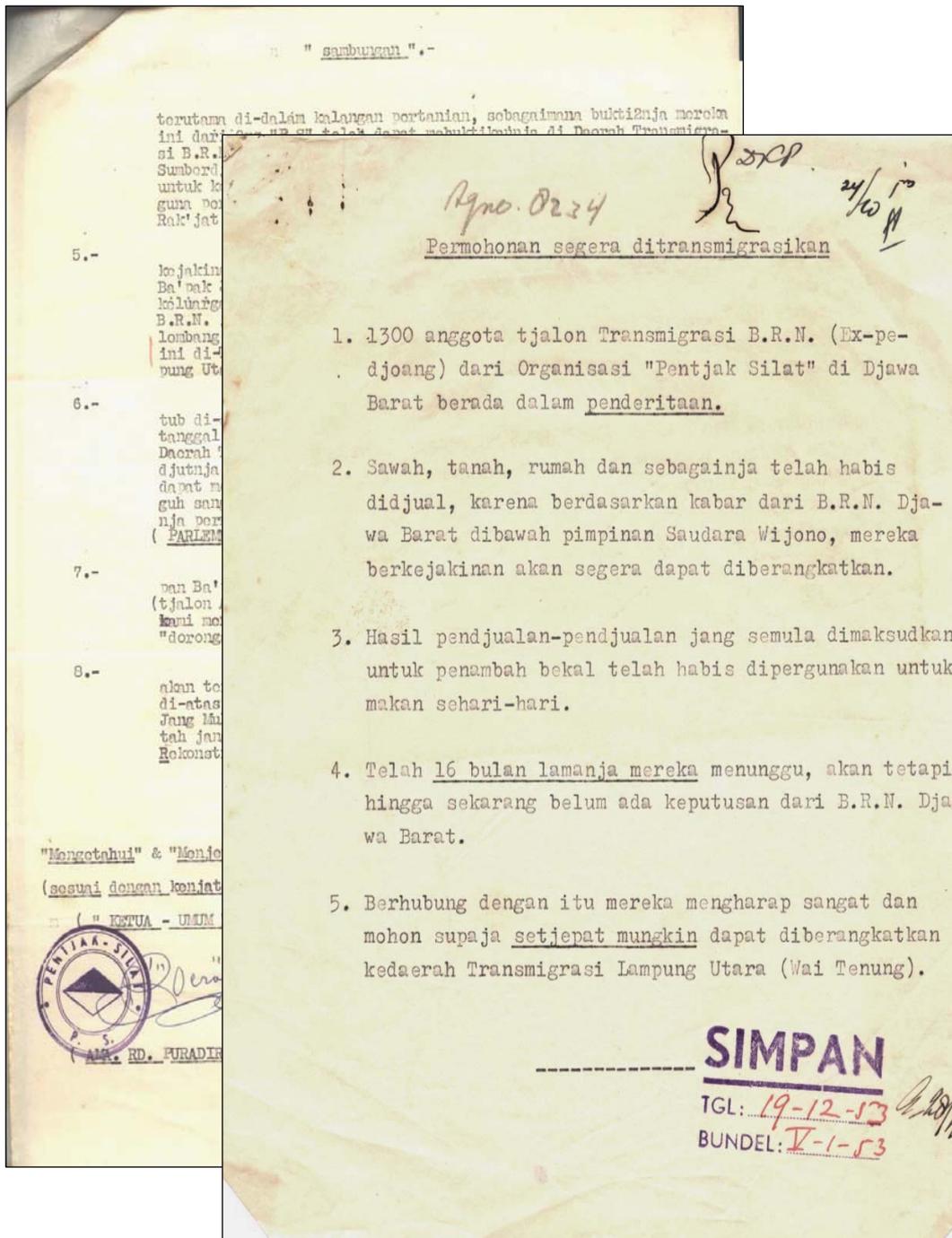
Dalam rentjana transmigrasi th. 1952 yang tertera dalam Ichtisar Statistik No. 4, terdapat **persiapan untuk transmigrasi umum** yang akan dilakukan ke Sumatera-Selatan dimulai dalam tahun 1953.

Persiapan ini terutama dilakukan di daerah **Sukadana** dalam keresidenan Lampung, ialah suatu daerah terletak antara sungai Way Seputih dan Batanghari.

Sebetulnja daerah ini sudah termasuk dalam rentjana kolonisasi Hindia Belanda dulu, dengan luas yang dimasukkan dalam rentjana ada 70.000 HA.



Ichtisar Statistik Transmigrasi, Triwulan II. 1952
Kabinet Presiden 2250



Surat-surat tentang calon transmigrasi dari Biro Rekonstruksi Nasional
(Ex. Pejuang) di Lampung Utara Wai Tenung.1953
Kabinet Presiden RI 2253

Kutipan daftar
 schema "Algemeen Werkplan".

Ontginningschema voor landbouwgronden
 en daarvoor in bedrijf te stellen "Units".

Jaar	aantal Units	Kolonisatie- - d	Blok	Vakken	ha	Verplaatsment
1	2					
2	4					
3	8					
4	8					
5	8					
6	8					
7	8					
8	8					
9	8					
10	8					
11	8					
12	8					
13	8					

Deze 134
 Overige
 bosreser
 met een
 ontginn

DAFTAR PUTUSAN JANG PENTING2 DARI DEWAN
 PENGURUS "JAJASAN PEMBUKAAN TANAH TRANSMIGRASI".

Diambil dalam rapat Dewan Pengurus - tanggal	Putusan - putusan	Keterangan
I 30 Oktober 1952	1. Menunjuk Sdr. R. Gaos Hardjasoemantri sebagai Sekretaris Dewan Pengurus. 2. Membentuk suatu ambtelijke Direksi sementara, terdiri dari : a. Sdr. R. Gaos Hardjasoemantri, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Sosial sebagai Ketua. b. Sdr. Ir. Beversluys, Penasihat Dewan Transmigrasi sebagai Anggota. c. Sdr. R. M. Ibnu Umar (kemudian diganti oleh Sdr. R. Koekoeh) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Anggota. 3. Menentukan tjara kerdja Direksi jaitu : a. Direksi menjusun rentjana pekerjaan. b. Rentjana teb. dikemukakan kepada Dewan Pengurus untuk diijtjarkan dalam rapatnja. c. Sebelum rentjana dilaksanakan disahkan oleh Dewan Pengurus lebih dahulu. 4. a. Menentukan untuk menjimpan uang Jajasan di Javascho Bank. b. Pertanggungangan djawab atas uang itu ada pada Dewan Pengurus. c. Untuk keperluan pekerjaan, Direksi meminta uang kepada Dewan Pengurus.	
I 14 Nopember 1952	1. Menjetudjui rentjana pekerjaan untuk phase I dan mengesahkan anggaran belandja phase pertama seluruhnja jang dibuat oleh Direksi.	
I 8 Desember 1952	1. Menjetudjui tindakan Ketua dan Sekretaris untuk menjimpan sebagai uang Jajasan jang didapat dari Dewan Transmigrasi Rp. 90.000.-- buat sementara waktu di Escompto Bank dan Rp. 10.000.-- di Kementerian Sosial (kemudian dari Escompto Bank diambil kembali). 2. Menentukan instruksi untuk Direktur /Direksi Japeta.	
I 30 Desember 1952	1. Menjetudjui dalam prinsip memberikan pekerjaan pembukaan tanah kepada badan2 pemborong besar dengan ketentuan supaja perdjandjian2 teb. lebih dahulu diselidiki benar2	Untuk ini Dewan Pengurus menjetudjui Direksi menjang iklan di surat2 kabar dan memborongkan kuasa agar Direksi selokas mungkin mengadakan

Laporan tahunan JAPETA (Jajasan Pembukaan Tanah Transmigrasi).

1953 - 1954

Kabinet Presiden 211

3. Bekas2 pedjuang yang ada di Lampung Selatan yang belum menggabungkan diri pada B.R.N. harus ditampung, dan di beri djaminan yang serupa dengan orang2 B.R.N. yang da- ri luar daerah itu.
 4. Penduduk lama perlu diberi perhatian pula oleh yang ber- wadjab, untuk menghindarkan rasa di anak tirikan yang selama ini telah menjadi2, keadaan itu dirasakan yang bersangkutan.
 5. Pamong2 yang didatangkan dari luar Lampung Selatan, te- rutama yang dari Djawa Selatan, orang2 yang be-

II. Menjampaikan resolusi

1. Presiden R.I. di Djakarta.
2. D.P.R. Pusat di Djakarta.
3. Kabinet R.I. di Djakarta.
4. Sama Menteri2 di Djakarta.
5. Djawatan Transmigrasi Pusat
6. B.R.N. Pusat di Djakarta.
7. Gubernur Kepala Daerah Prop
8. D.P.R. Propinsi Sum. Sel. di
9. Djawatan Transmigrasi Prop
10. Kantor B.R.N. difandjungi
11. Residen Lampung R.I. di Tel
12. Kepala Daerah/Dpd Lampung

Tindakan disampaikan

1. 20 para anggota D.P.R. Lamp
2. Djapan Lampung Selatan di
3. Sama Organisasi/Partai se
4. B.A.K.O.P.O.L. di Telukbet
5. dan Organisasi2 Bekas Ped.
6. Para Asistent Wedana se-
7. Para Kepala Negeri se-
8. Para Kepala Negeri se-
9. Dpr/Dpd Lampung Utara di
10. Dpr/Dpd Lampung Tengah
11. Pers/Radio.-

Telukbet
 Dewan Peraja
 Kabupaten
 K.H.

Keputusan F.W.M. Presiden tab. pada agno. 2225/54

RISET PRESIDEN
 A.P.O. 20/1/54
 IMA: 17.3.54

DEWAN TjABANG "MASJUMI" KAB. LAMPUNG-SELATAN

pada rapatnja yang ke VI beresama organisasi tetonon dan anggota, letima- waja pada tgl. 5 Maret 1954 di Tj. Karang, atas nama seluruh anggotanja se-Kabupaten Lampung Selatan jg. terbentuk dalam 16 Anak Tjaban- na di tiap2 Kotjamatan, dan termasuk dalam 350 ranting pada tiap2 kampung di tiap2 Kotjamatan, dan termasuk dalam 350 ranting pada tiap2 kampung yang berdjumlah 75.000 anggota x tiap anggota terdiri rata2 dari 5 ko- lumbaja jang berdjumlah = 5 x 75.000 jiwa = 375.000 jiwa, diantara lain telah mengambil keputusan sebagai berikut :

M E M O R A N D U M

1) Surat mosi DPR Kab. Lampung-Selatan No. 188/Dpr/1953 mengenai per- sadaraan "transmigrasi".

2) Surat2 pengesahan dan penetapan dari :

- I. a. P.K.I. Lampung Selatan tgl. 20 Djanuari 1954.
- b. B.T.I. Lampung Selatan tanggal 9-2-1954.
- c. Sebeli Lampung Selatan tgl. 4-2-1954 No. 024/DR/IV/54.
- d. Nota PKI Lampung Selatan tgl. 10-2-1954.
- e. P.H.I. Gudingradjo d.k.k. tgl. 10-2-1954.
- f. B.T.I. Gudingradjo d.k.k. tgl. 7-2-1954.

pada umumnja tidak membaratkan mosi DPR No. 188/Dpr/1953.

II. a. F.W.I. Lampung Selatan tgl. 22-2-1954.
 b. Potani Lampung tanggal 14-2-1954.
 c. Kerbagai Lampung tanggal 18-2-1954
 jang pada umumnja menganggap Mosi DPR No. 188/Dpr/1953 kurang bi- djaksana dan terlambat kolurnnja dan membaratkan serta mengharuskan peninjauan kembali.

III. a. S.T.I.I. Kab. Lampung Selatan tgl. 30-1-1954.
 b. Pernyataan dari Partai2 dan organisasi Kotjatan (F.W.I, F.I.R, PKI, MUSLIMAT, MASJUMI) tanggal 27-1-1954.
 c. Pondjelasan DPR Lampung Selatan terhadap Statoment PKI dkk. tor- tgl. 20-1-1954.
 d. Pernyataan STII Anak Tjaban: Kodondong menjokong Statoment STII Lampung Selatan tgl. 30-1-1954.
 e. Kotjorangan Kotua DPR Sumatera Selatan (Ali Gathair) dan pernja- tean dari anggota Dewan Perajaan Daerah Sumatera Selatan (Ta- hir Hasan) tertuat dalam Berita Kodondong jg. tertit tgl. 2-3-'54 No. 1430 th. ke VI, bahwa pada prinsipnja ada membaratkan dan mo- nitoring Mosi DPR Lampung Selatan no. 188/Dpr/53.

M E M O R A N D U M

1) Putusan Komporoni B.R.N. seluruh Indonesia tgl. 26-27 Nopember 1953 di Lampung, bahwa tidak akan diadakan/didatangkan transmigranten jang baru tetapi titik berat rantjana B.R.N. ialah KONSOLIDASI bagi para bekas pedjuang jg. sudah ada di Lampung.

2) Bahwa kenyataan peditnja daerah Kabupaten Lampung-Selatan dengan pon- duknja jg. sekarang baik penduduk lama maupun ditambah dengan pondu- duk jg. baru telah berdjumlah 500.000 jiwa, dibanding dgn. keadaan daerah2 Kabupaten2 sekitarnya seperti Kab. Lampung Utara dan Kab. Lam- pung Tengah, masing2 baru berponduduk Kab. Lampung Utara lebih luas, dan Kab. Lampung Tengah 160.000, sedangkan daerah Lampung Utara lebih luas, dan daerah Lampung Tengah hampir sama dgn. luas Kab. Lampung Selatan.

3) Bahwa menurut rantjana Pemerintah Lampung Selatan sendiri, akan memba- ka perawahan pengirnan (weduk) dalam daerah Kab. Lampung Selatan, ma- lai th. 1954 dan akan mempergunakan tanah seluas puluhan ribu h.a. (membuka sawah baru i.k. 4000 h.a, penempatan penduduk jg. dari tem- pat pembukaan weduk Rezekimontara sebanyak 6000 keluarga, dan untuk weduk teb, puluhan ribu h.a.), serta pemindahan penduduk lokal dari tempat

SIMPAN
 TGL: 22-3-54
 BUNDEL: 17-1-54
 20/5

Pernyataan beberapa partai terhadap Mosi DPRD Kabupaten Lampung Selatan tentang persoalan transmigrasi Lampung. Desember 1953 – Maret 1954
Kabinet Presien RI 2257

KUNJUNGAN



Menteri Sosial R.P. Suroso dan rombongan tiba di lapangan Teluk
Betung, Lampung. 29 Juni 1955
Kempen No.K550629 DD2-2



Menteri Sosial R.P. Suroso bersama rombongan menumpang trailer menuju ke hutan, untuk menyaksikan pembukaan hutan di Lampung.

29 Juni 1955

Kempen No.K550629 DD2-7



Menteri Sosial R.P. Suroso bersama rombongannya tengah meninjau alat-alat dan traktor untuk pembukaan tanah dari N.V. Sukadana di Lampung. 29 Juni 1955

Kempen No.K550629 DD1-8



Menteri Sosial R.P. Suroso dan rombongannya tengah meninjau perumahan para transmigran di Lampung. 29 Juni 1955
[Kempen No.550629 DD1-12](#)

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ontvangen bij de Afdeling ^{2/3} den Redacteur
 Afgedaan door idem
 Geresumeerd door H. Laalberg
 Ag. 3646/98.

Ontvangen bij den Gouvern. Secretaris
 Afgedaan door hem U. G. 30
 (Afd. C.) Blindrak
Telok Betong

BESLUIT.

N^o 28. Buitenzorg, den 30^{de} Maart 1898.
 GEARRESTEERD. Gelesen de rapporten:

a gelesen het rapport van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid van 10 Februari 1898 No 3609 en de overgelegde missive van den Resident der Lampongsche Districten van 30 November 1897 N^o 4062;

Is goedgevonden en verstaan:)

Eerstelijk: Te bepalen dat te Goenoeng Soegih (Lampongsche Districten) wordt geopend eene openbare Inlandsche school voor lager onderwijs der 2^e klasse.

Ten tweede: Maaktiging te verlenen om ten behoeve van de in artikel 1 van dit besluit bedoelde school tot tijd en wils op andere wijze in de behoefte wordt voorzien, een lokaal in te huren tegen een' maandelijkschen huurprijs van ten hoogste f 20 (twee-tig gulden), onder aantekening, dat de hieruit voortvloeiende uitgaven, voor zooveel 1898 betreft

*b. van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken van 14 Februari 1898 n^o 55;
 De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord (adones van 18 Maart 1898 n^o III);*

REG. 41450
 EXP. art 1
 MIN. 641
 IND. art 2
 NOT. 641
 O. B.

Besluit No.28 tentang Sekolah Umum Pribumi untuk kelas 2
 di Goenoeng Soegih. 30 Maret 1898
Algemeene secretarie Ag.3646/98

- a. Dibidang seni drama kami sudah dapat menimbulkan saling pengertian diantara tokoh drama dan djawatan kita atau sebaliknya, dan kami telah kerap kali mengadakan rapat2/tjermah2 dengan mereka dan hal ini dapat kami lihat kepada perhatian mereka atau sikap mereka pada waktu kami mengadakan festival drama se Propinsi Djambi, dimana mereka ikut serta setjara aktif membantu kami dalam pelaksanaannya. Dan laporan mengenai hal ini setjara mendetail telah kami sampaikan ke Pusat.
- b. Dibidang seni tari, kami ikut serta melatih seniman/seniwati terutama peladjar SIP/SIA dalam hal menari ini. Dalam hal mata peladjaran krida disekolah kami bekerja sama dengan Pendidikan Dasar dalam menjumbangkan tenaga melatih peladjar tob.
- Mengenai senitari ini kami baru bergerak pada tari daerah Djambi sendiri dan tari nasional, dan untuk lebih membangkitkan kegiatan mereka kami telah pula menjelenggarakan sajenbara tari daerah Djambi ini pada permulaan Djambi ri 1968 jl. dan mendapat perhatian ja ng tjulup banjak dari masyarakat setempat. Hal ini djuga kami lakukan untuk melihat penari jang terbaik di Propinsi Djambi. Dan pada saat ternahir ini kami sedang melatih anak2 tingkat Tema n Kanak2 dan Sekolah Dasar kelas I/II dalam tari daerah Djambi djuga untuk kami se- jembarakan pada hari kebangkitan nasional a.d. Latihan untuk ini sudah berjakan dengan baik dan perhatian dari anak2 sangat besar sekali. Adapun tujuan kami disamping mengadakan kegiatan seninja, kami djuga dapat melihat/membangkitkan minat menari itu mulai dari kanak2. Untuk itu kami rentjatakan akan diikuti oleh 3 buah daerah tk. II di Propin- si Djambi, dan untuk pelaksanaannya kami bekerja sama dengan guru2 sekolah tob.
- c. Dibidang seni suara kami telah ikut mengedjar/melatih peladjar SIP/ SIA dalam paduan suara, dan sedjela n dengan sajenbara tari kanak2 tadi, kami djuga mengadakan perlombaan paduan suara untuk njanjian nasional.
- Disamping tujuan kegiatan seninja, djuga sekaligus kita dapa t menin- bulkan kembali perhatian mereka kepada lagu2 nasional. Dan keraja sa- ma dengan RRI/TV studio Djambi baik sekali.
- d. Dibidang adat istiadat kami telah pula mengundjungi beberapa buah tep- pat, dan untuk hal ini berhubung biayanja sangat besar (uang djalan) maka tingkat II kami tugaskan agar lebih memperhatikan bidang ini.

Kegiatan kami setjara umum pula, kami pada tgl. 15 dan 16 April j.l. telah mengadakan malam kesenian jang kami ambil dari tenaga seniman/seni- wati jang ada dikota Djambi, jang merupakan malam amal korban kebakaran Kampung Lant jang terletak tidak berapa djauh dari kota Djambi itu. Hal ini telah menghasilkan uang sebesar Rp. 50.000 dan pada malam ternahir itu langsung kami serahkan kepada Ketua Panitia Bentjara Alam dimana un- tuk disalurkan kepada jang berhak menerimanja.

Kegiatan kami jang sedang dalam penyelesaian sekarang ini ialah usaha kami dengan wali kota Djambi, untuk meminta agar Gedung Nasional Kota Djam- bi jang selama ini diurus oleh pegawai wali kota tob. dapat diserahkan pe- ngurusannya kepada Kantor Daerah Kebudayaan Propinsi Djambi, dan jang ter- penting jaitu dengan sendirinja kami dapat berkantor dikedjangan tob., jang letaknya dipusat kota Djambi itu.

Hal ini tentu banjak sekali mempengaruhi kegiatan kami dibidang kebudaja- an ini. Hal itu telah disetujui oleh walikota tob. dengan dikeluarkannya surat putusan anak itu pada tgl. 19 Maret 1968, jang semuasannya dikirim- kan kepada dan Direktur Djendral, tetapi kemudian kobetulan walikotanja tiba2 bertukar karena pemilihan oleh DPR-nja, dan walikota jang baru itu memberitakukan lagi bahwa surat putusan j.l. itu akan ditinjau kembali. Dan sampai saat saja berangkat ini belum lagi mendapat penyelesaiannya. Sekianlah laporan singkat dari kami selama tahun 1968 ini.

Tjipajung, 26 April 1968.
Kepala Kantor Daerah Direktorat
Djendral Kebudayaan Prop.Djambi
ttd.

(Marthias),.-

Tambahan :

1. Mengenai Maseum, dahulu memang sudah ada usaha untuk mendirikan suatu Maseum Tata Hidup di Djambi, tetapi sampai sekarang masih belum terlak- sana.

Dan

Laporan pendidikan dan kebudayaan di Lampung. Juli 1968
Sekretariat Kabinet 167



Keluarga dari Lampung dengan berpakaian daerah, Lampung.
KIT NO. 1086/056



Pasangan Pengantin Derah Lampung.
KIT NO. 388/16



Kepala kampung/lurah bersama gadis-gadis penari Lampung.
KIT NO. 1094/013



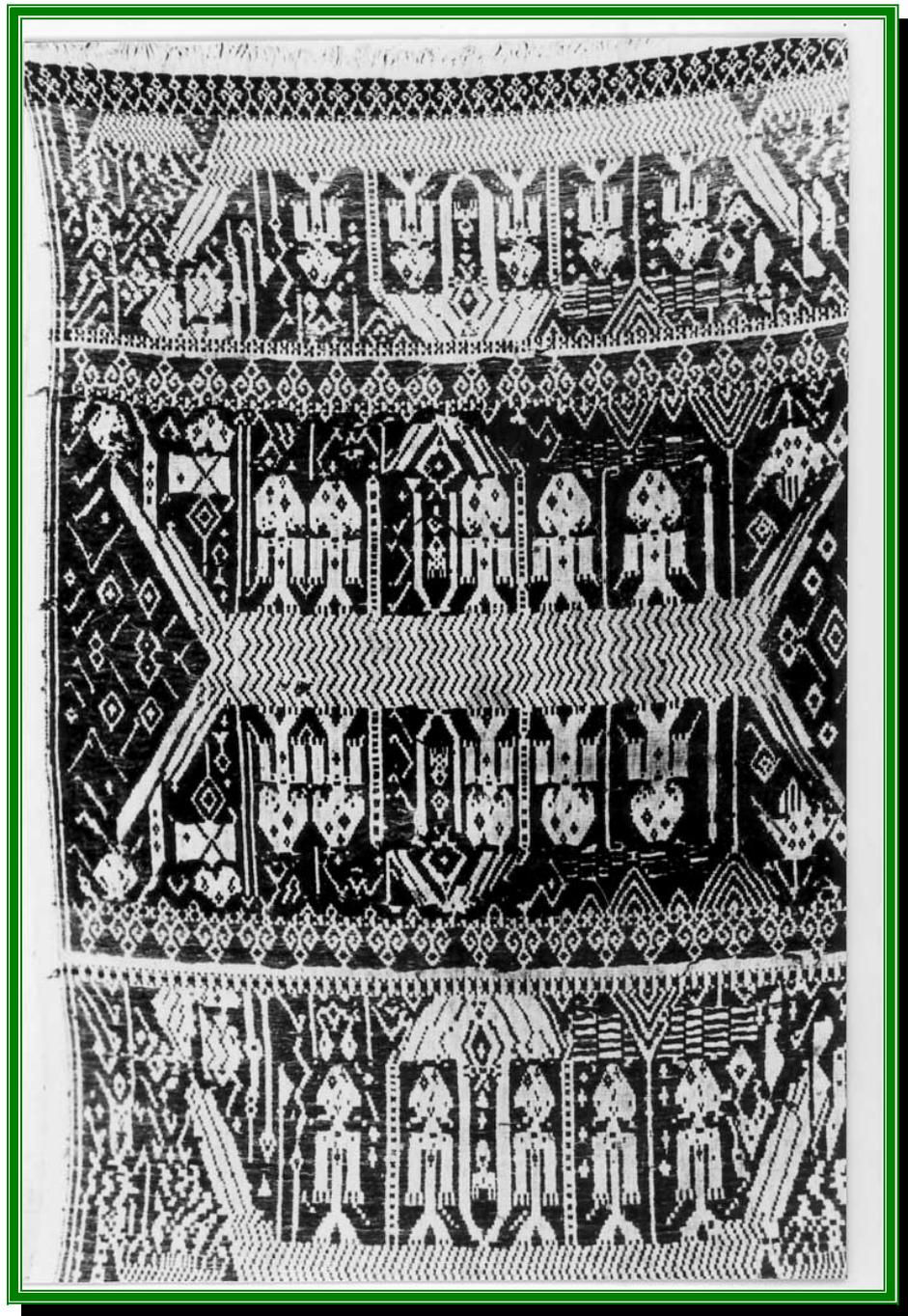
Pakaian adat pria dan wanita, Lampung.
KIT NO. 0385/002



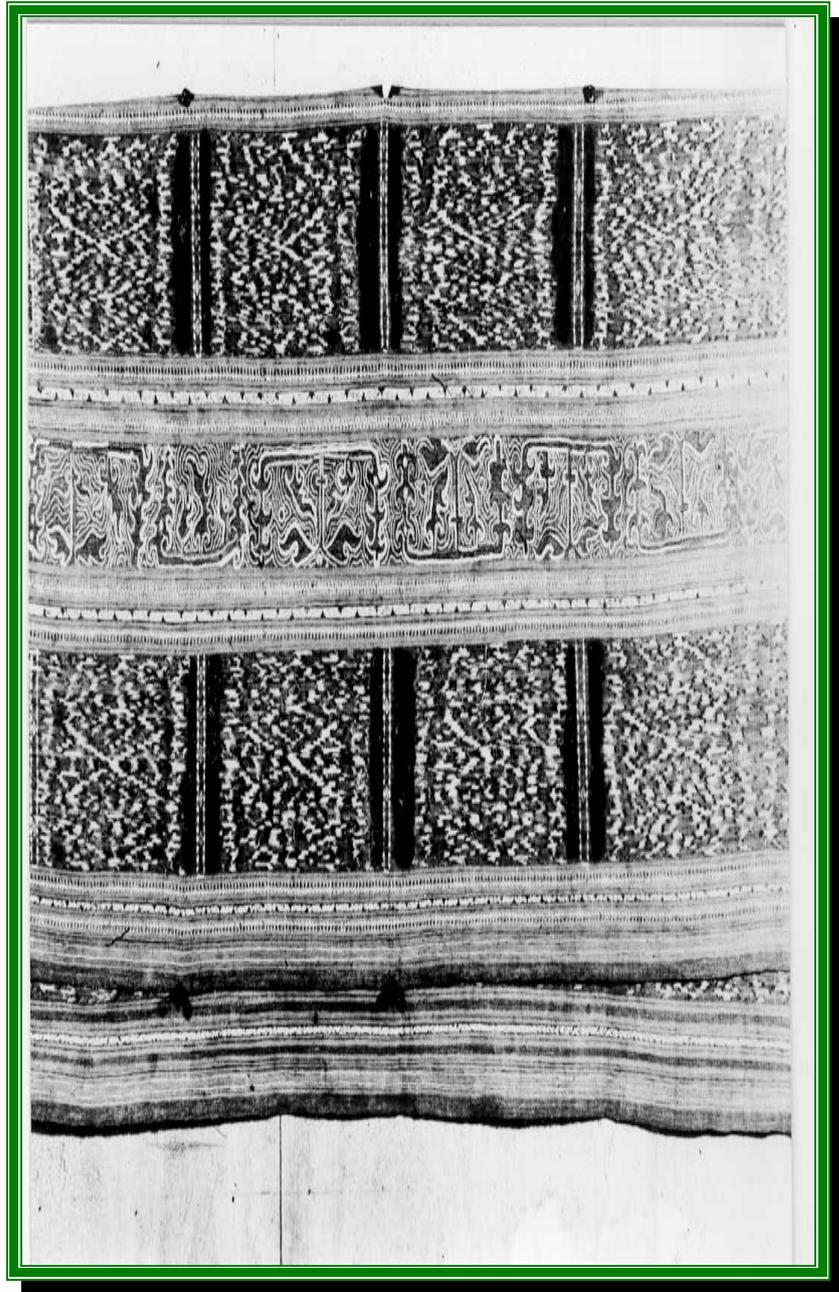
Pakaian adat wanita, Lampung.
KIT NO. 0385/004



Pakaian pesta ibu dan anak wanitanya, Lampung.
KIT NO. 0288/024

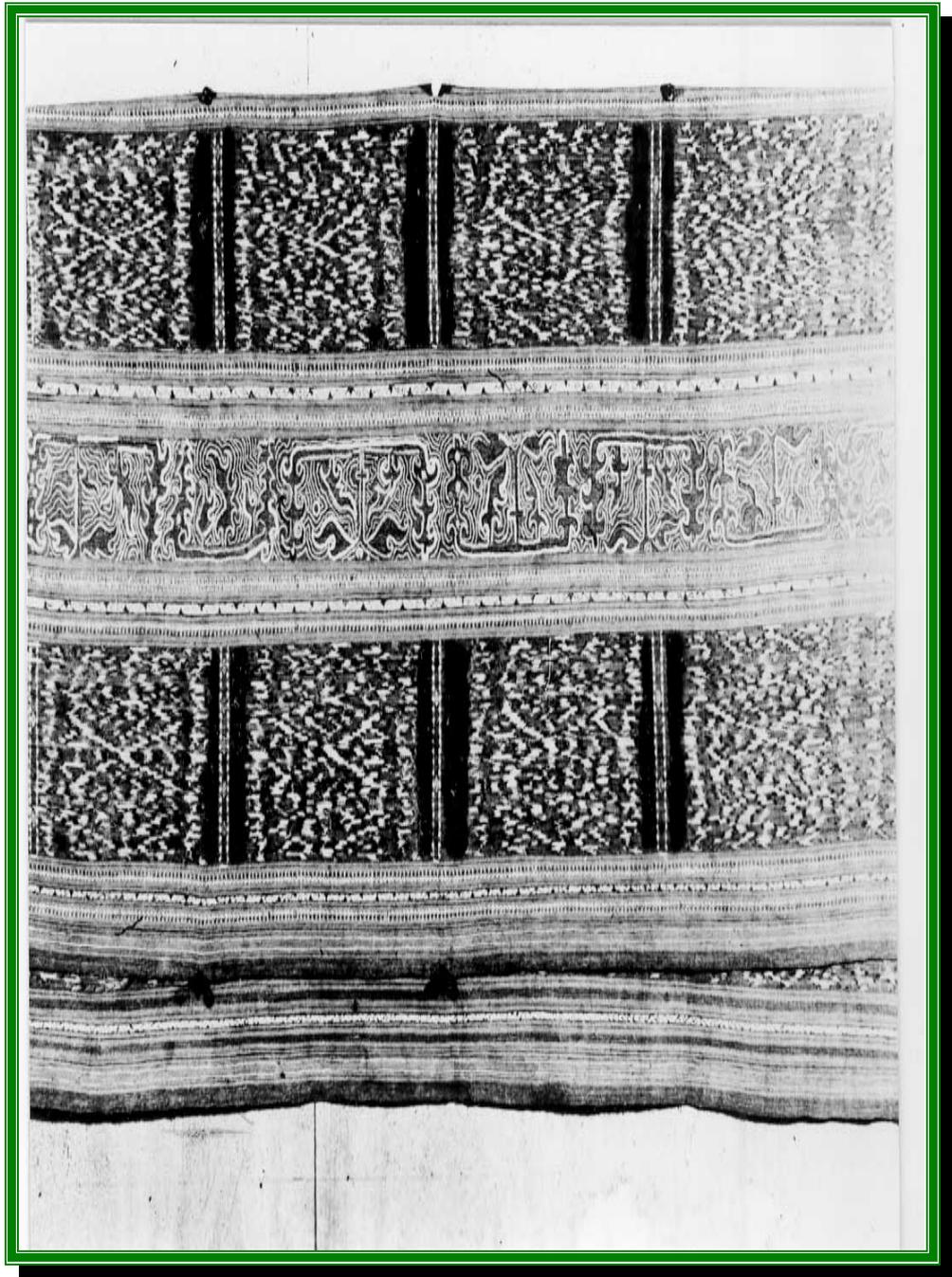


Kain katun bermotif geometris, Kruai, Lampung.
KIT NO. 0729/030



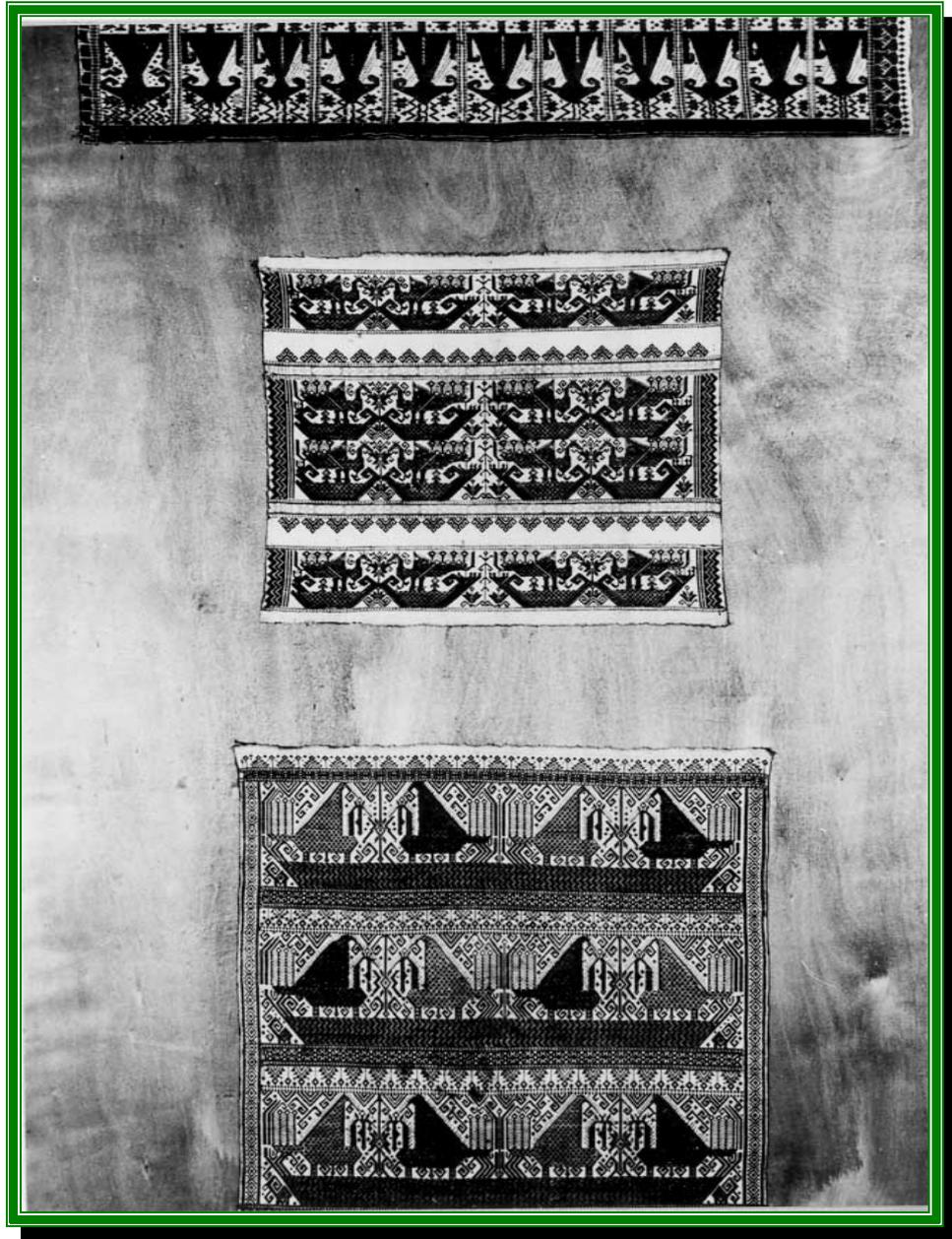
Kain katun tenun Sarang Penganten, Lampung.

KIT NO. 0729/048



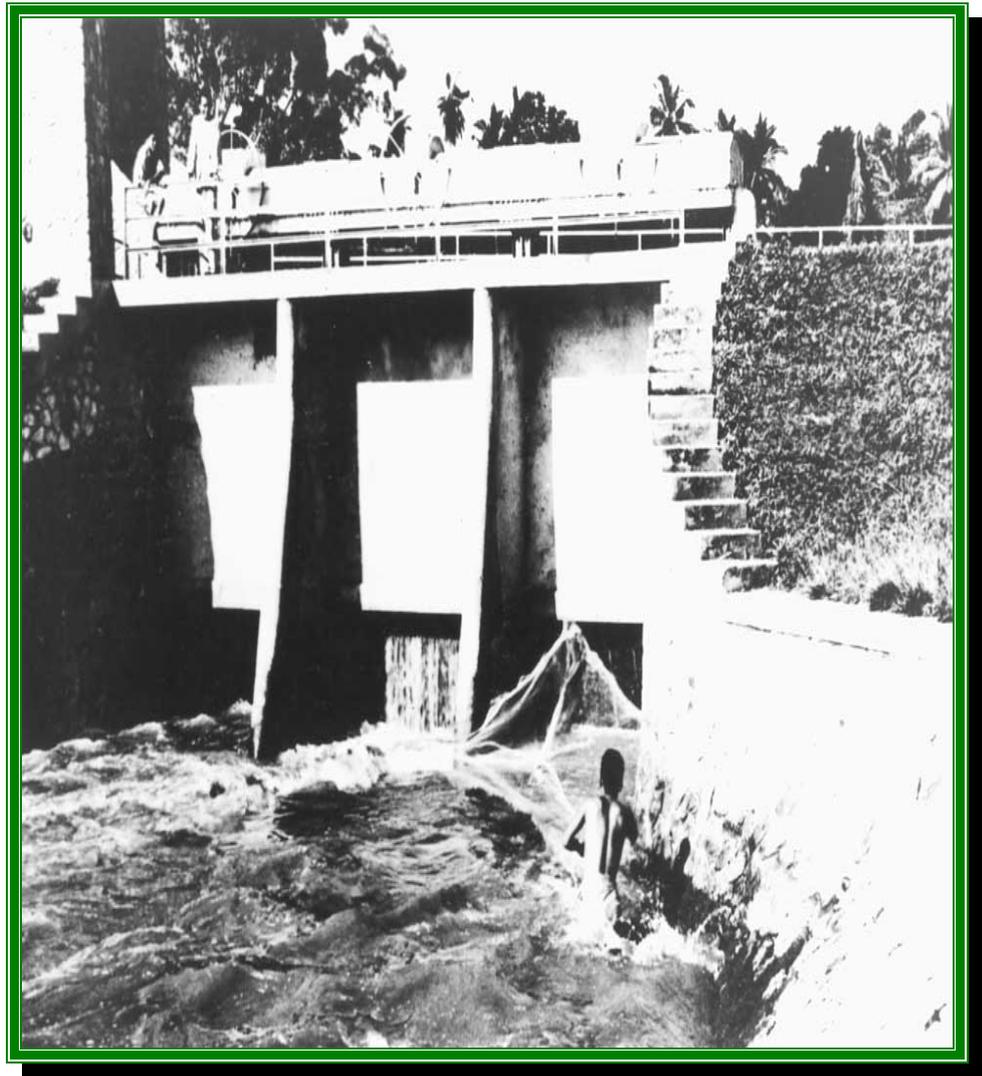
Kain tenun dari Kruai bermotif Kapal, Lampung.

KIT NO. 0729/010

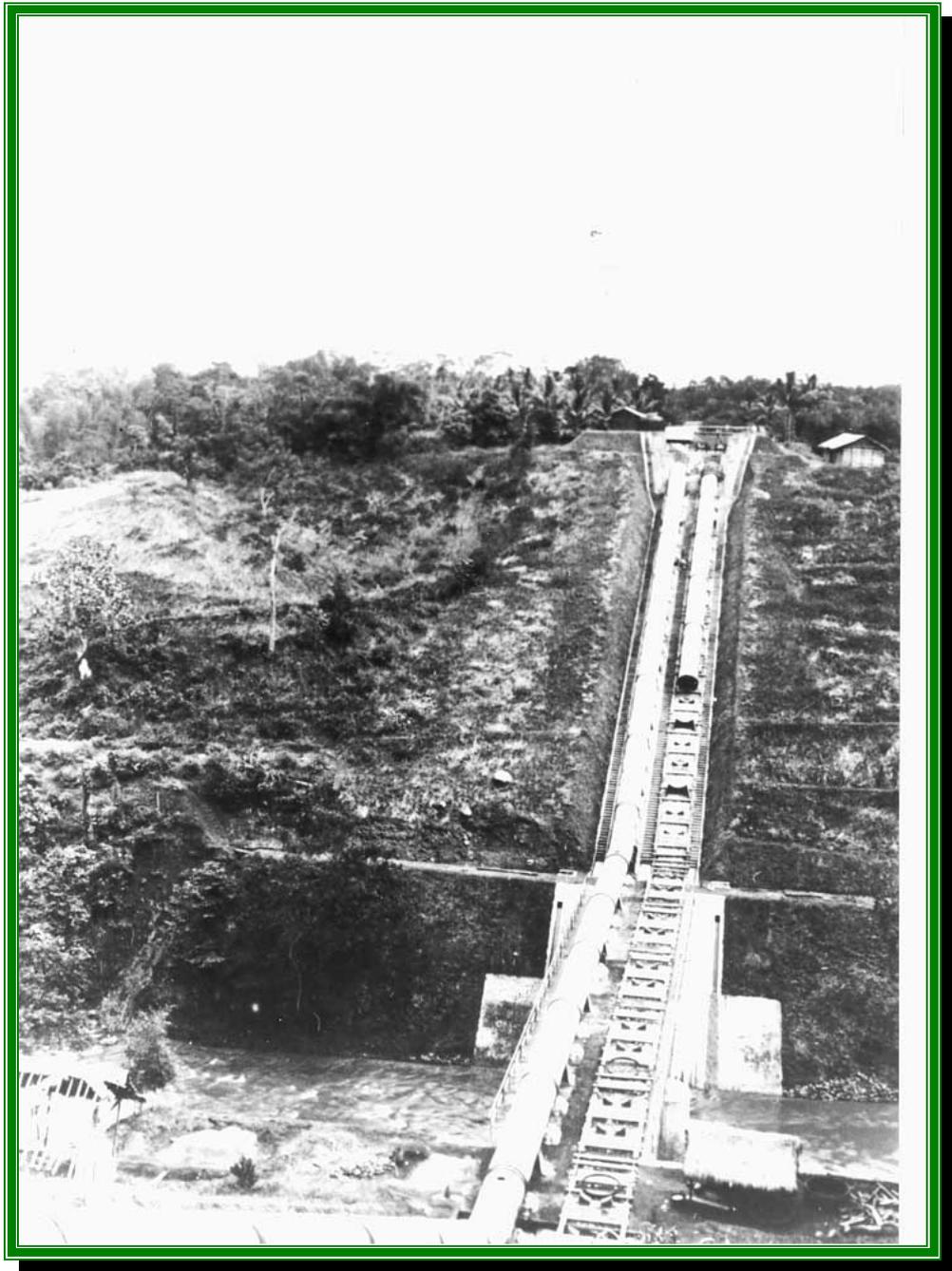


Tenunan Kruik Antik, Lampung.
KIT NO. 0729/011

IRIGASI/ PENGAIRAN

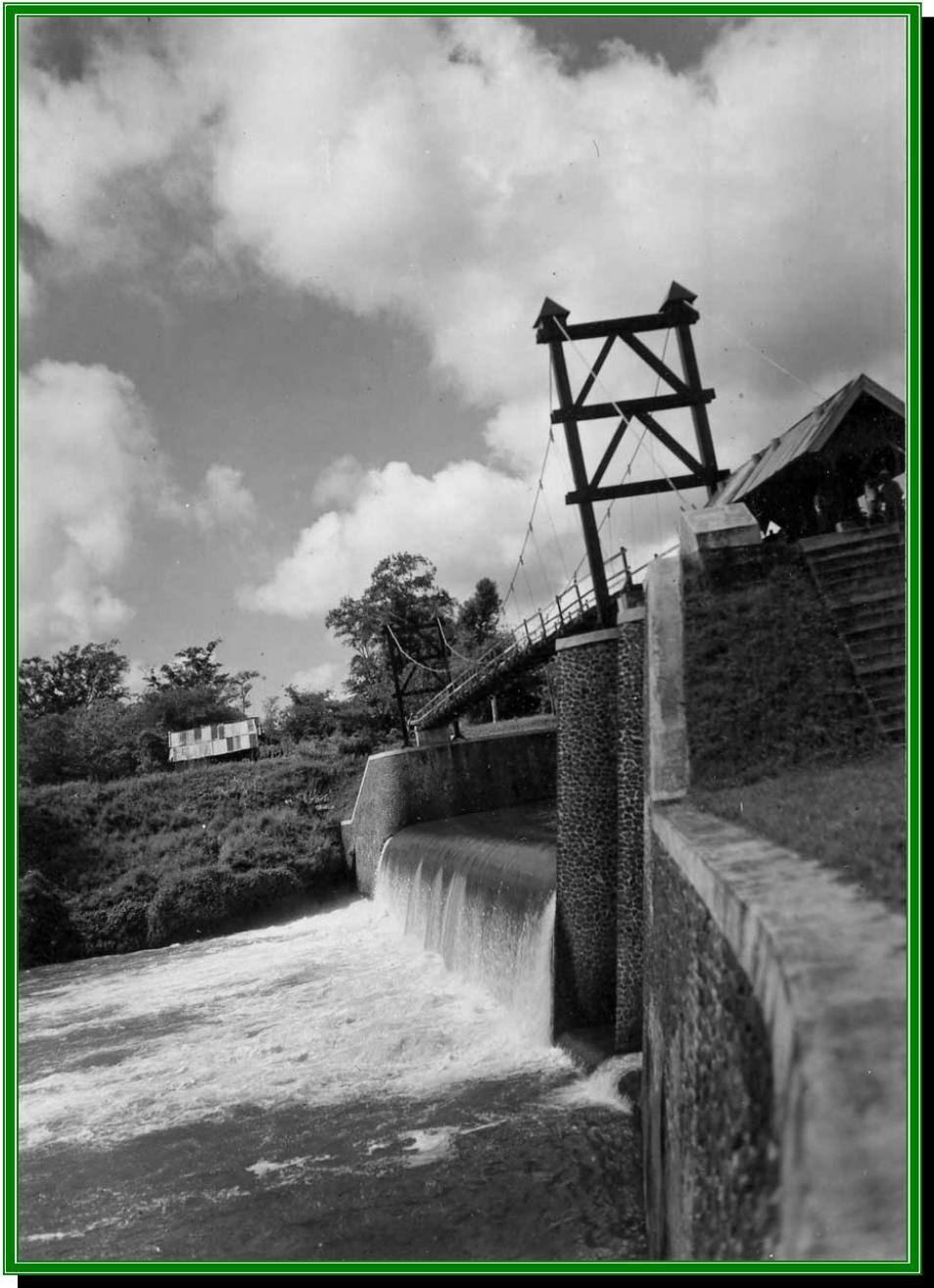


Bendungan irigasi air untuk sawah di Tulang Bawang, Lampung.
KIT NO. 0531/067



Pipa penampung air untuk irigasi di kali Metro, Lampung.

KIT NO. 0534/071

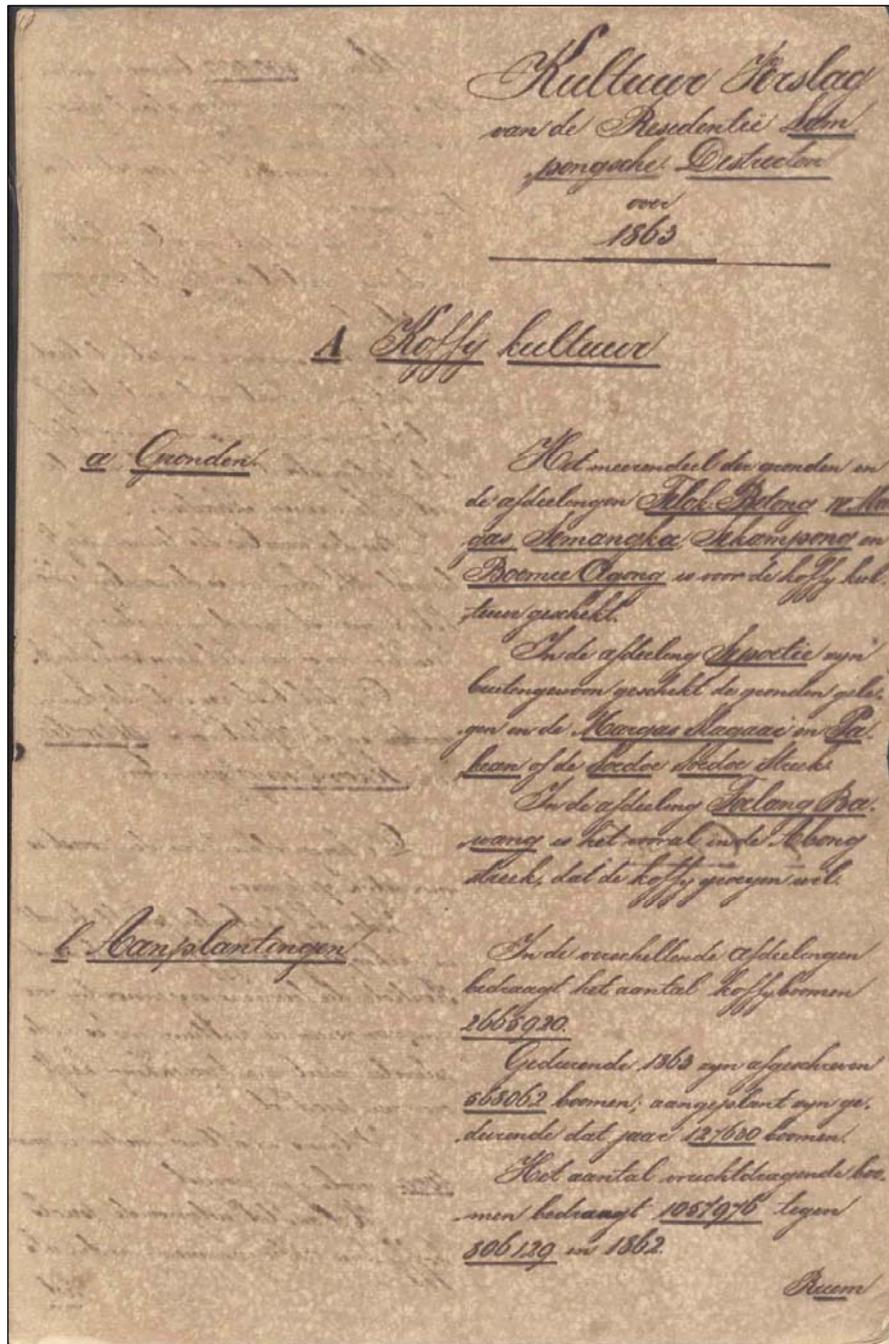


Saluran air sungai Klingi di Tugu Mulyo, Lubuk Lingau. 16 April 1951
Kempen No.512373



Pengairan di Metro, Lampung. 24 Juni 1952
Kempen No.520624 DD-19

PERKEBUNAN



Kultur verslag van de residentie Lampongsche Districten. 1863
 Lampong 25

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
PALEMBANG.-

1004/66

Palembang, 7 Mei 1966.-

1. J.M.
2. J.M.

Nomor : 1/454/P.Buk.SS/66
Perihal : Remilling ex.Malaysia.-

RAHASIA

Dengan hormat,

Dengan ini kami ingin ng berhubungan dengan bidan ng Propinsi Sumatera Selatan :

- Berdasarkan info jang k sia P.T. REMCO jang ter bang oleh Wakil Sekretaris DASAAD MUGIN CONCERN.-
- Dalam hal ini dapat kami ada dibawah penguasaan l selalu mematuhi peraturan soal wadajib produksi dan bawah ini :
Wadajib produksi untuk k Desember 1965 ditentuka 76 ton.-
Nopember 1965 ditentuka 91 ton.-
Oktober 1965 ditentuka 168 ton.-
Dan mengensi soal wadajib pihak ketiga tanpa melanja pihak ketiga itu ialah nas "asa dan Hasi dan A ringatkan mereka baru m dah tertumpuk dipabrik maka atas dasar keputus Kpts.19/Opess/1965 P.P.
- Dapat kami utarakan dis dengan ex-Malaysia dan lling ex-Malaysia jaitu N.V. Samifa, N.V. Sunan pihak DPAB-GR Propinsi rintah Pusat melalui Pe rahkan semua remilling erah Sumatera Selatan g Daerah Sumatera Selatan tuntutan ini selalu did sidang bila membahas pe

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

3931/14/4

Kepada
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung
di
Tandjungkarana.-

No. Pem 35/1/23. Tanggal, 19 Mei 1966 1966. Lampiran : 1 (satu) ekspl.

Perihal : Pengaliran alabs kedaerah Lampung.-

Dengan hormat,

Selubungan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Mei 1966 no. 22/460/P-BukSS/66 perihal tersebut diatas jang ditujjukan kepada Jang Mulia Wakil Perdana Menteri bidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan, dan tembusannya antara lain djuga disampaikan kepada kami, jang untuk djelasanja salinannya terlampir pada surat ini, kami harapkan perhatian Saudara atas hal-hal tersebut dibawah ini.

- Djika sekiranya para eksportir dan pengusaha remilling karet jang ada didaerah Saudara itu ternyata tidak mematuhi peraturan-peraturan jang berlaku, maka tentulah kepada mereka itu akan dapat dikenakan tindakan-tindakan jang mendiskualifikasikan usaha mereka.
- Tindakan-tindakan demikian itu tentu berpengaruh pula terhadap kelanjutan djalanja pembangunan didaerah Saudara pada umumnya. Sebagaimana halnya dengan kami, maka tentulah Saudara tidak menghendaki terhambatnja pembangunan itu disektor apapun.
- Kami pertjaja, bahwa dengan bantuan instansi-instansi Pemerintah jang ada didaerah Saudara dan dengan kebijaksanaan pimpinan Saudara, maka telah dapat dilakukan tindakan-tindakan jang perlu untuk menjegah, meredakan dan meniadakan kemungkinan terjadinya hal-hal jang merugikan Daerah Saudara, maupun dalam hubungannya dengan Daerah lain, serta kepentingan Nasional pada umumnya.

4. Dalam

Surat-surat tentang persoalan perkaretan dari daerah Sumatera Selatan yang mengalir ke daerah Lampung. Mei 1966

Ekubang 579



Tanaman jagung di ladang yang baru dikerjakan di daerah Tugu Mulyo.
6-19 April 1951
Kempen No.512368



Kebun Lada di Kota Bumi, Lampung. Juni 1952
Kempen No.520624 DD-11



Kopi tanaman rakyat, di Lampung. 27 Juni 1952
Kempen No.520627 DD-15



Penyemaian pohon kopi, Lampung.
KIT NO. 0089/068



Menabur bibit tembakau, Lampung, 1950.
KIT NO. 0141/077

PERINDUSTRIAN

Lampiran.

Perkiraan Anggaran Tambahan Modal Investasi Proyek Produksi Pangan di Kotabumi guna pembukaan tanah baru seluas 500 ha untuk penanaman padi/djagung dengan menggunakan pemairan.

(Harga2 dalam)

I). Pembelian tambahan mesin dan kendaraan (a.l. jalatrol-type, 4 wheel-tractor, 8 seeddrill-fertili-4 cultivator, 4 ridger, duster, 1 combine, 1 Uni-1 mesin pipil djagung, 1 air dengan 60 meter pipa 2 fuel-tank-trailer)

II). Pembelian 1 Pembangkit 60 KVA

III). Pembuatn Bangunan (gudamahan)

IV). Pembuatn waduk2 dan sal

V). Pengerasan djalan dan po

VI). Perlengkapan Penggergad

VII). Transport mesin2 ke Proj

Konsep

Kepada
7/4/66
Deputy Menteri
Departemen Produksi
dan Persediaan Bahan
Makanan
di Djakarta

Perihal:
Penambahan
Modal investasi
proyek produksi
pangan.

Merujuk pada surat saudara No. 95/11. Perh/66 tanggal 26 April 1966 mengenai hal yang tersebut pada pokok surat ini, maka mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini sebaiknya penambahan produksi pangan ~~di~~ di proyek Kotabumi (Lampung Utara) terlebih dahulu dikerjakakan dengan perlengkapan serta alat yang telah ada di daerah tersebut.

TIA 7/6/66
M/S

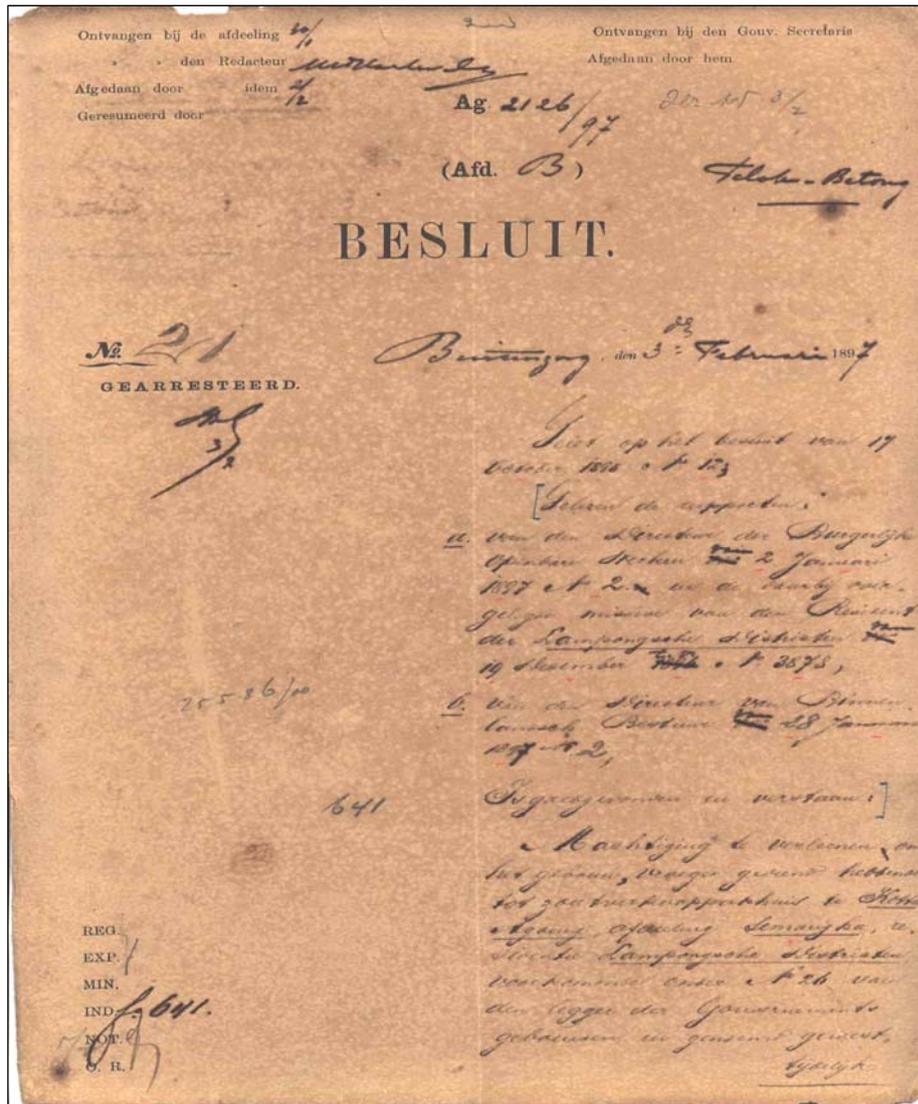
Wakil Perdana Menteri
Bidang Ekonomi Keuangan
dan Pembangunan

Hamengkubuwono IX

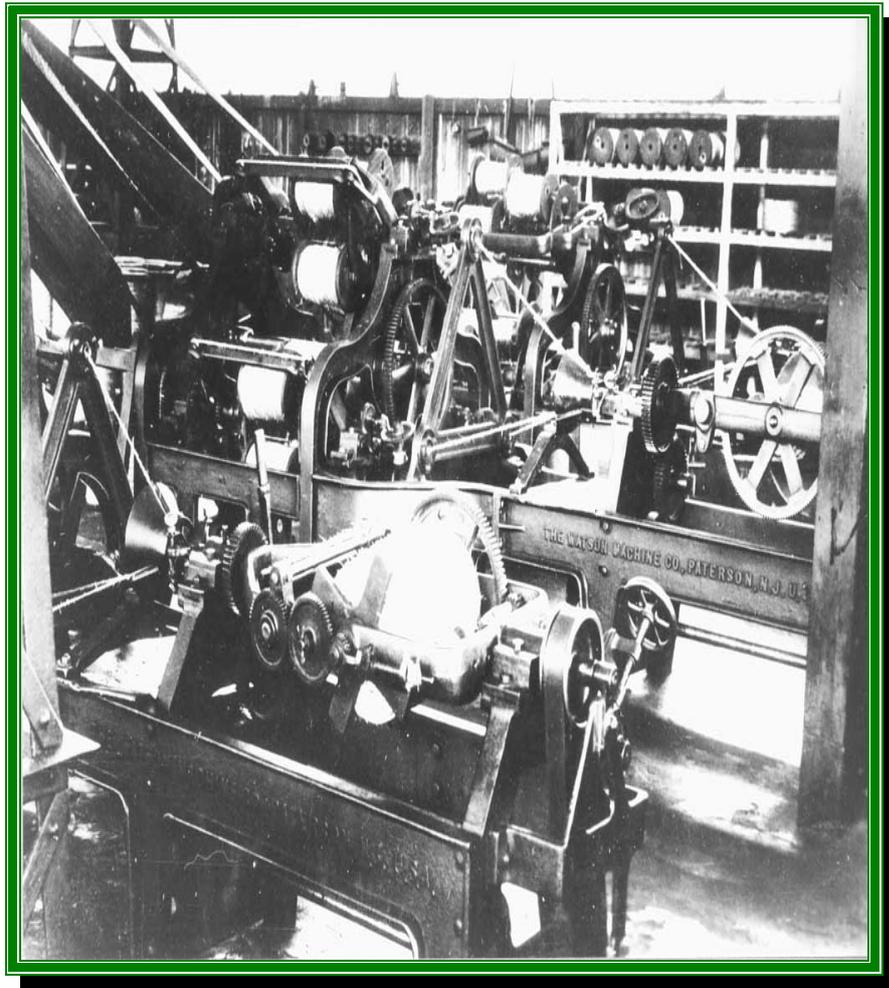
Tembusan:
1. J.M. Menteri Pertanian
2. ~~1/11/66~~ 1/11/66. Deputy Menteri
Departemen Urusan Anggaran
Negara
3. Kantor Pusat Proyek
Produksi Pangan.
di.

Surat tentang penambahan modal investasi Proyek Produksi Pangan di Kota Bumi (Lampung Utara). 26 April 1966

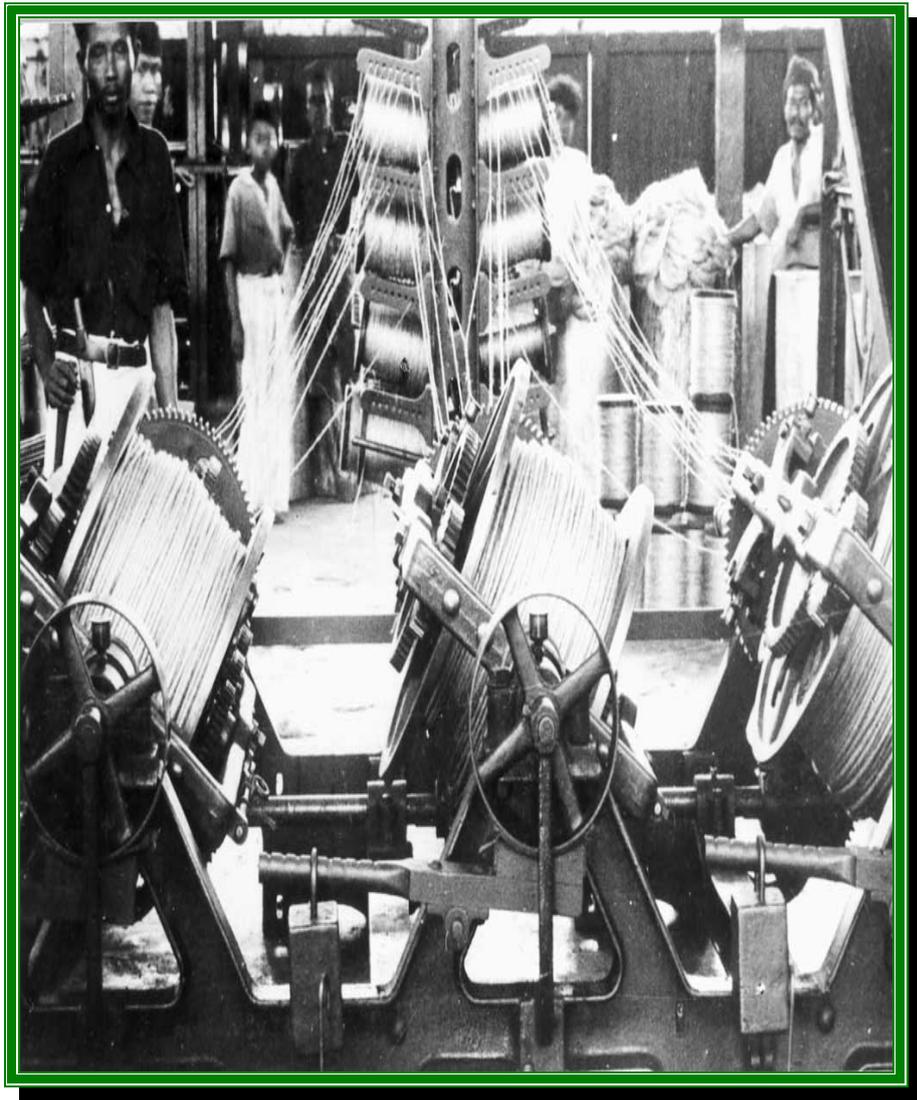
Ekubang 631



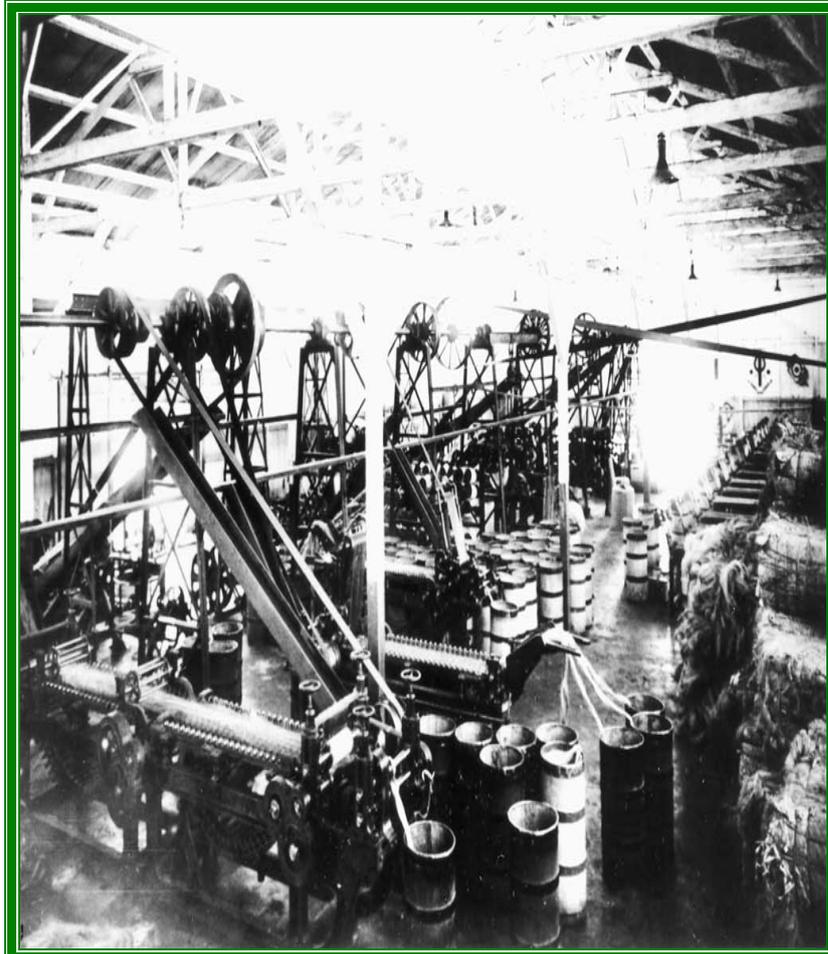
Besluit No.21 tentang pembangunan yang dulu pernah dipergunakan sebagai gudang penjualan garam di Kota Agung. 3 Februari 1897
Algemeene secretarie Ag.2126/27



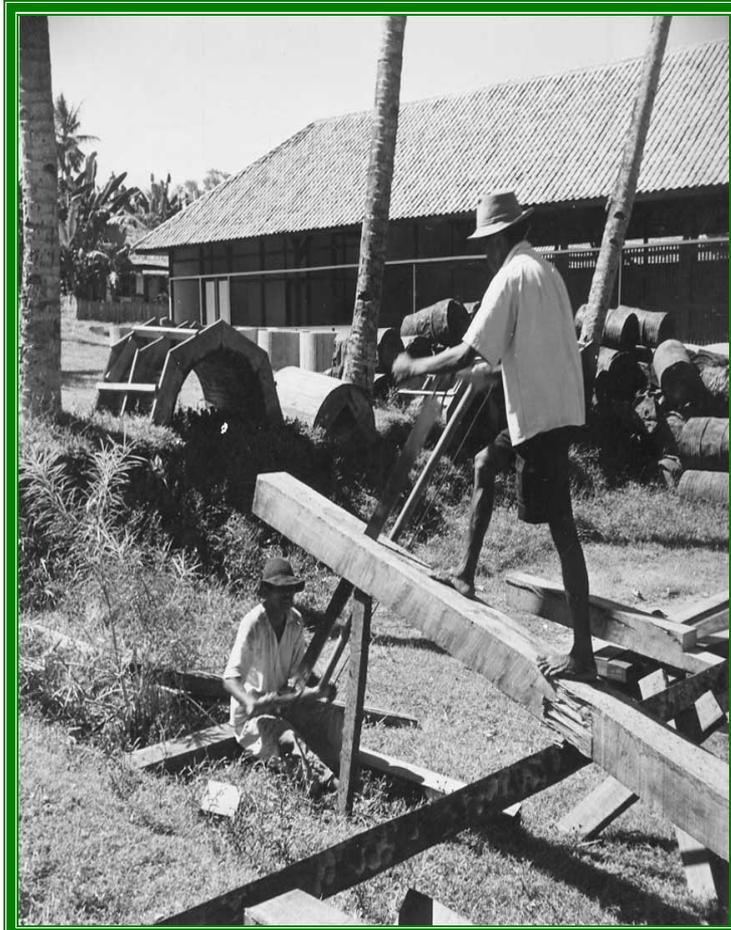
Mesin di Pabrik Tali, Tanjung Karang, Lampung.
KIT NO. 0740/054



Mesin pemintal di Pabrik Tali, Tanjung Karang, Lampung.
KIT NO. 0740/034



Peralatan pewarna benang di Pabrik Tekstil "Cisaat" Lampung.
KIT NO. 0723/057



Tukang-tukang kayu sedang menggergaji kayu untuk pembangunan
di Teluk Betung. 25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-44

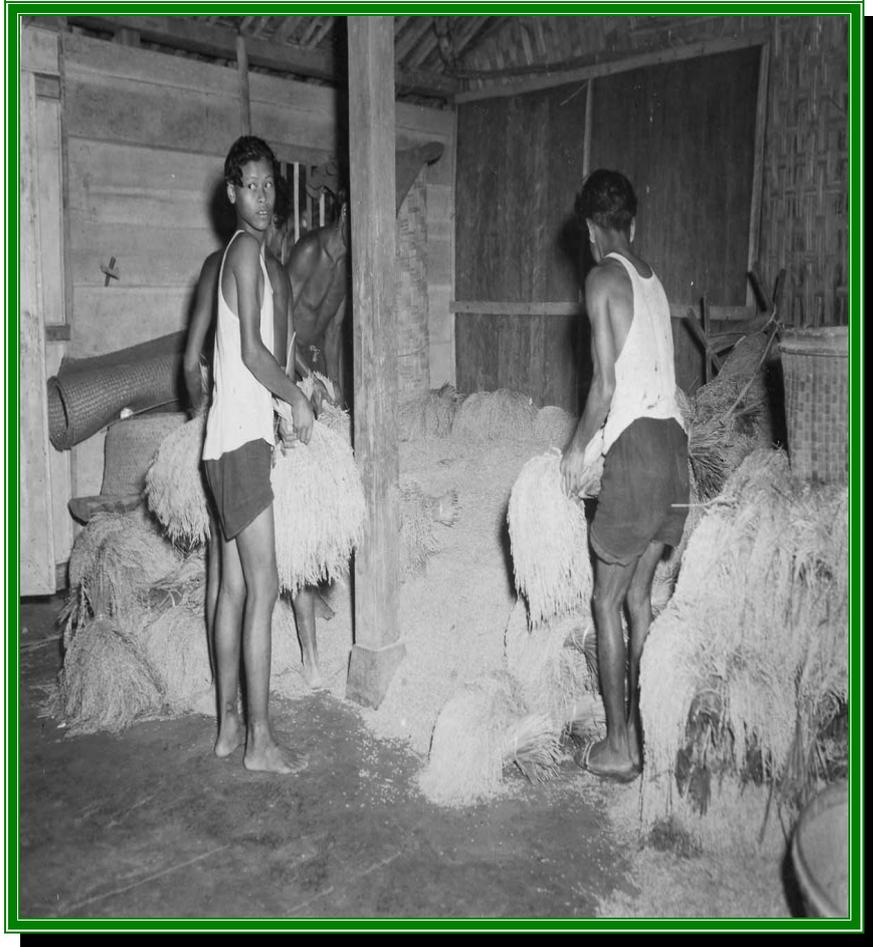


Usaha pembikinan Tegel-Batu Cement dan Pemborong Bangunan
di Kota Bumi. 28 Juni 1952
Kempen No.K520628 DD-15

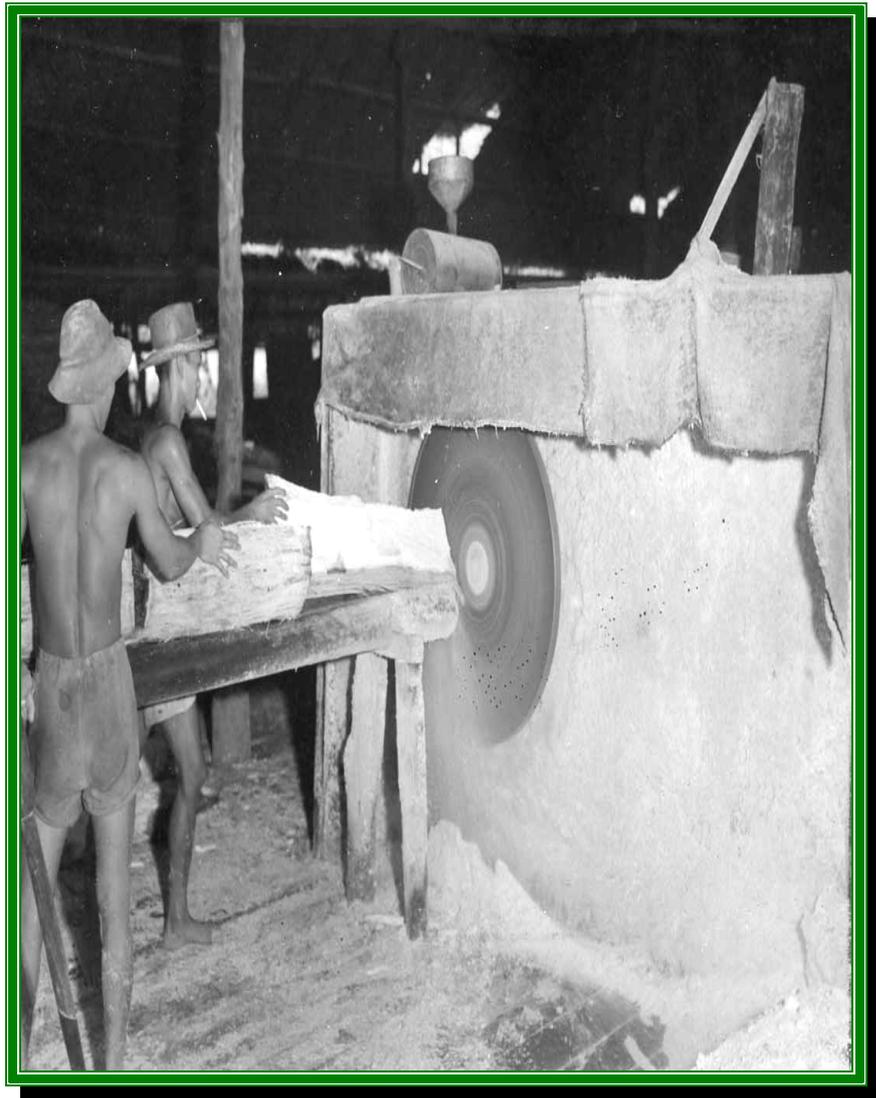
HASIL BUMI



Pemetikan lada ketika panen, Lampung.
KIT NO. 0622/060



Hasil panen padi dari salah satu keluarga penduduk Desa Belitang
(Martapura) Lampung. 6-19 April 1951
Kempen No.512323



Pembikinan sagu aren di Selat Panjang (Batang pohon aren,
sesudah dikupas kulitnya digiling dengan mesin menjadi bubuk).

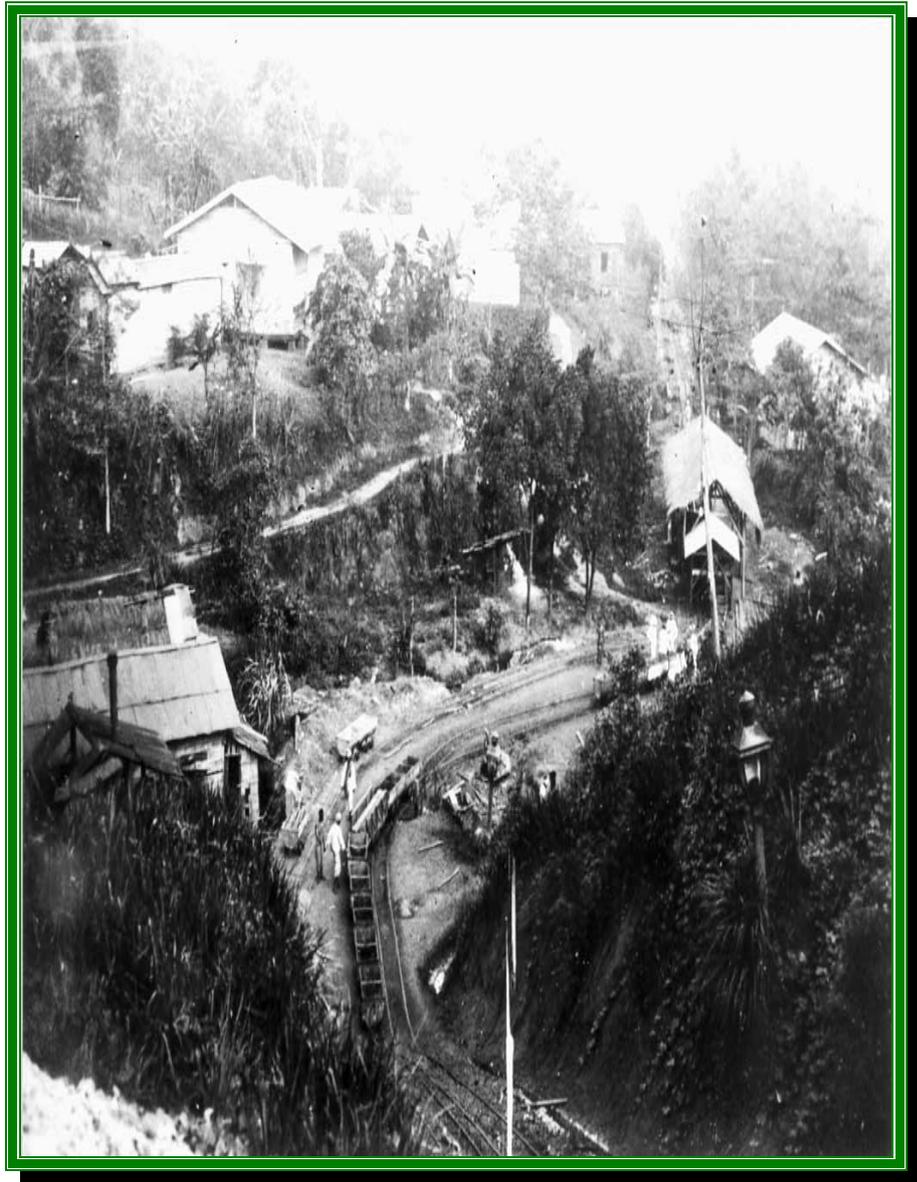
28 Juli 1951

Kempen No.516612



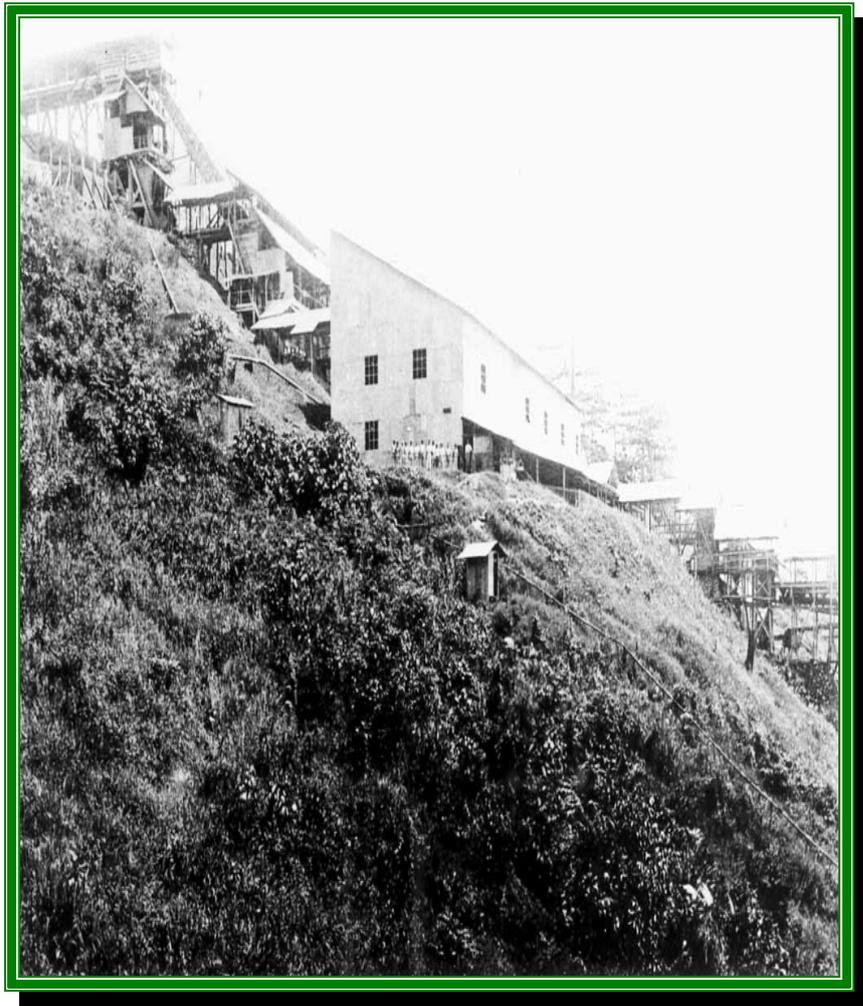
Hasil ikan laut yang ditangkap. 23 Juni 1952
Kempen No.520623 DD-22

PERTAMBAHAN

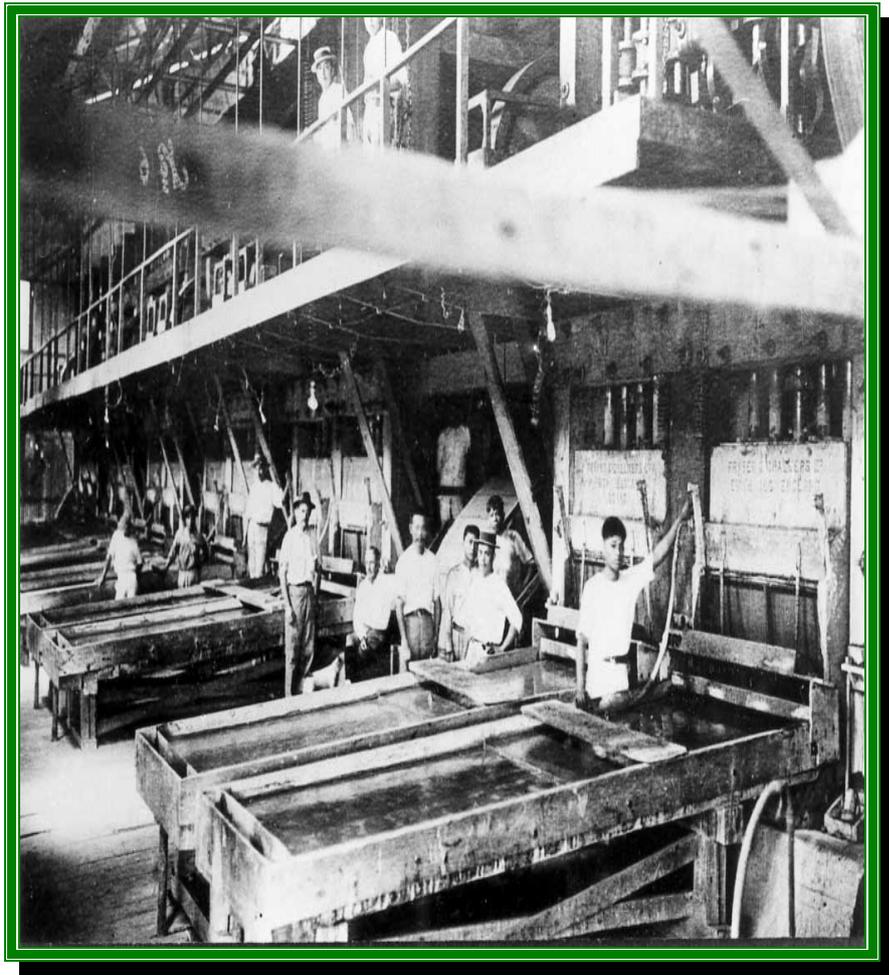


Perusahaan tambang batubara di Panjang, Lampung.

KIT NO. 0481/062



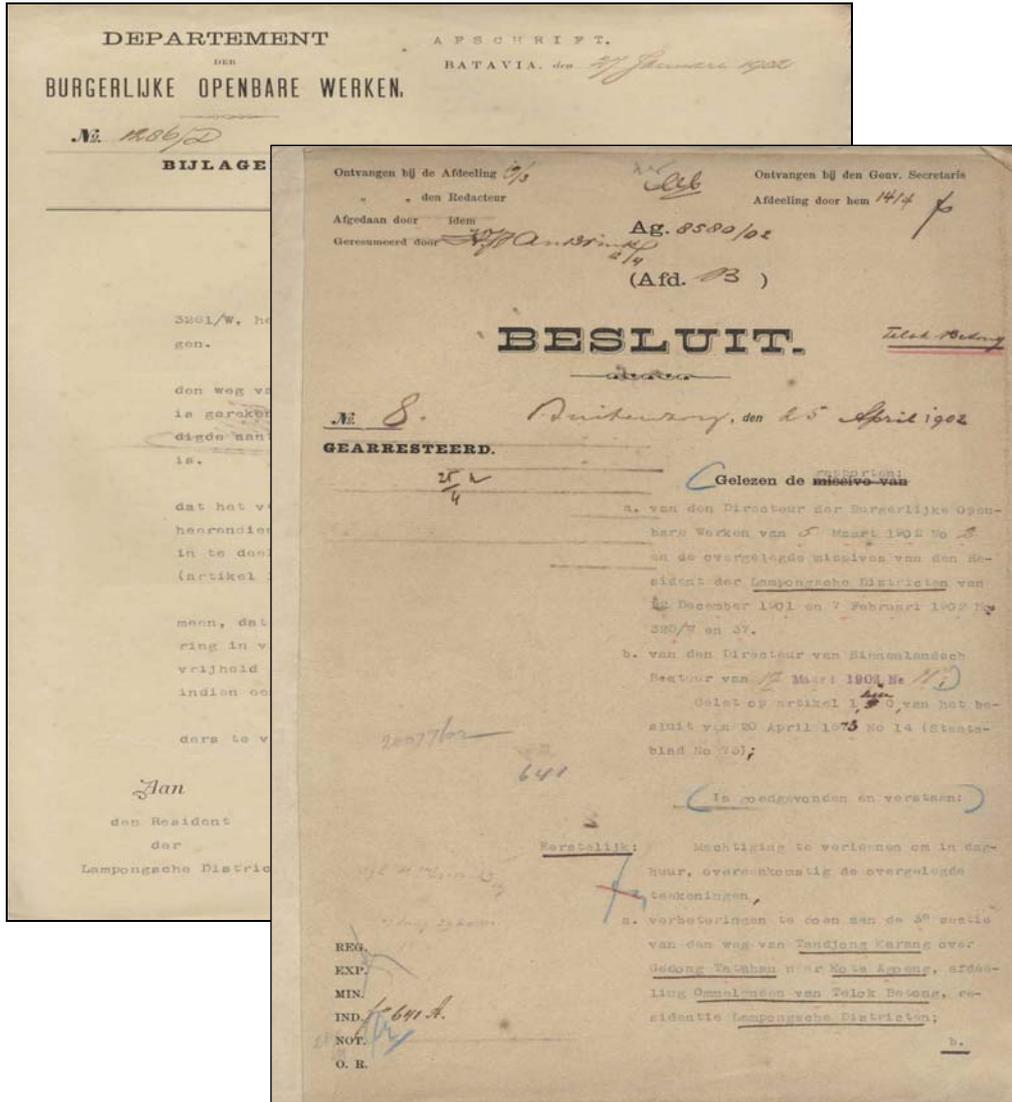
Perusahaan tambang emas dan perak di Sudi Mampir, Lampung.
KIT NO. 0486/072



Perusahaan tambang emas dan perak milik Belanda di Sudi Mampir,
Lampung.

KIT NO. 0487/008

PERHUBUNGAN



Besluit No.8 tentang perbaikan jalan dari Tandjung Karang melintasi Gedong Tatahan ke Kota Agoeng, afdeling Ommelanden Telok Betong, Keresidenan Distrik Lampongsch. 25 April 1902.
Algemeene secretarie Ag.8580/02

DEPARTEMENT
 DER
 BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.
 RAPPORT van 21 Januari 1902, No. 1
 BIJLAGEN:
 C w. o. G. B.

1/2 - 3359

Ontvangen bij de Afdeling 1/2
 den Redacteur 1/2
 Afgedaan door Idem
 Gecommuniceerd door 1/2

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris
 Afdeling door hem 4/2

Ag. 3359/02
 (Afd. B)

ONDERWERP.

Bouw van een nieuwe brug
 afbraak van de brug Kocala, ge-
 legen in den postweg van Telok
 naar Kalianda, afdeling Omme-
 van Telok Betong, residentie
 pongasche Districten.

Ontvangen bij de Afdeling 1/2
 den Redacteur 1/2
 Afgedaan door Idem
 Gecommuniceerd door 1/2

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris
 Afdeling door hem 4/2

Ag. 3359/02
 (Afd. B)

BESLUIT.

№ 20 Duitserij, den 5 Februar 1902.

GEARRESTEERD.

5/2

Gelezen de missive van
 het rapport van den Directeur der Bur-
 gerlijke Openbare Werken van 21 Janu-
 ari 1902 No. 11;
 geleet op artikel 1, C van het be-
 sluit van 10 April 1873 No 14 (Staats-
 bina No 73);

Is goedgevonden en verstaan:

Machtiging te verleenen om in dag-
 huur, overeenkomstig de overgelegde
 teekeningen, met afbraak van de brug
 Kocala, gelegen in den postweg van Te-
 lok Betong naar Kalianda, afdeling Om-
 melanden van Telok Betong, residentie
 Lampoenasche Districten, een nieuwe brug
 te bouwen;

zijnde de kosten, blijkens de mede over-
 gelegde begroeting geschat op:

aan geld.....	f 2400
" materialen van Lande.....	" 2659
te samen	f 5059

(Vijf)

REG.
 EXH.
 MIN.
 IND.
 NOT.
 O. D.

641

Besluit No. 2 tentang robohnya jembatan Kocala di Jalan utama
 Telok Betong ke Kalianda. 5 Februari 1902
Algemeene secretarie Ag.3359/02

Model No. 116.

Voorts is op grond van de ervaring, opgedaan bij den bouw van de kabelbrug over de W. Beloe, in dezelfde streek gelegen en waar onder nagenoeggelijke omstandigheden als bij de Madja gewerkt wordt, stellig te verwachten dat de in de begrooting opgenomen post voor de drooghouding der fundeeringselementen laag is.

Bovendien zijn de verscheidende in de begrooting uitgetrokken bedragen voor arbeidsloon in verband met de inmiddels naar voren gekomen moeilijkheid om werkvolk in de Lamboeng Districten te krijgen, te laag gebleven.

Voorts werden reeds ingekochte materialen als zand, grind en kalksteen tijdens een storm weggespoeld, terwijl een aantal vaten vernat werd, zoodat de inhoud onbruikbaar werd.

De bedragen voor den bouw van opslagplaatsen en tijdelijke woonverblijven sullen verhoogd moeten worden met het oog op de beter onderdak brengen van werkvolk en bezicht houdend personeel.

Voor meerdere details moge worden verwezen naar de hierbij gaande, op deze suppletie aangaande betrekking hebbende stukken (vide geeflijst).

De als gevolg van de voormelde oorzaken vereischte som bedraagt f 12.800. Er moge ik Uwe Excellentie in overweging deze suppletie toe te staan en daartoe de noodzakelijke overeenkomstig het bijgevoegde besluit.

De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken,

J. B. Buisson

1621-31

Ontvangen bij de Afdeling 36
den Directeur

Afgedaan door idem *7/6-12-1931*

Geresumeerd door

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris
Afgedaan door hem *127*

Ag. 9474/31
(Afd. B)

Telokbetong
Patent 1931

BESLUIT.

den 8 April 1931

GEARRRESTEERD:

Gelesen-

Gelet op het besluit van 17 Mei 1930 No. 11;

Gelesen het verslag van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken van den 27sten Maart 1931 No. B 7/2/4;

Is goedgevonden en verstaan:

Machtiging te verleenen om voor de voltooiing van het werk: "Het bouwen van een versterkte kabelbrug type V.35 model 1924, over de Way Madja tusschen km 117 en km 118 in den weg Kotaagung - Sanggi", afdeling Telokbetong, residentie Lamboeng Districten, boven het bij de beschikking van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken van 21 December 1928 No. B 7/3/12

B 7/3/12

RDD.
9/2
MIS
INI
NOV
O. 14

Besluit No.1 tentang Kabelbrug yang kaku tipe U.35 model 1924,
melintasi Way Madja diantara KM 117-118 jalan Kota Agung-Sanggi,
Teluk Betung, 8 April 1931
Algemeene secretarie Ag. 9474/31

10. Het gebeurde is praktisch beschouwd de aanvang van een lucht-oorlog.

11. Met betrekking tot bovenbedoelde gebeurtenis wordt hier nogmaals aan herinnert, dat op de 7e Juli 1948 een Stinson van de Republiek Indonesië, piloot vermist in de omgeving

12. Aangezien op aan de Nederlanders door antwoord is ontvangen, passagiers van genoemde aangehouden.

13. Indien aan h gevolg wordt gegeven, l om besprekingen te voer a. de Nederlanders ons cargo vrijgeven met het gebeurde. b. de Nederlanders zullen voorschriften als on zullen worden geeerb

14. Tot zover, vo

Doordruk aan:
Z.E. de Minister van De

Vertaald door CMI Afd. V

Exemplaar Nr.: 57

CENTRALE MILITAIRE INLICHTINGDIENST
DOCUMENTATIE
Geleidebrief.

GEHEIM

O.M.I. Document Nr.: 5706

Ontvangen dd. 27/12-1948

Van: Jogja

Geg. Betr. inbeslagname: Afkomstig uit het archief van HATTA.

Taal: Eng./Beh.Indon. Gdateerd: 23 October 1948

Getypt. Aard der dooc.: orig.

Gewaardeerd door Nr. 7 dd. 14/4

Vertaald door Nr. 1 dd. 2/6

Korte beschrijving:

- I t/m IV. Rapport over de vlucht van de vermiste R.I.002 op 30/9-1948 en 1/10-1948, welk rapport werd opgemaakt door de Sectie Luchtmacht van het vmlg. Rep. Ministerie van Defensie t.b.v. de Minister van Defensie a.i. Drs. MOH. HATTA.
- V. Telegram dd. 16/10-1948 van "thamboo", New Delhi aan MOH. HATTA en SANTOSO, betrekking hebbend op het vermiste Republ. vliegtuig R.I. 002.
- VI. Rapport van de Chef Staf Luchtmacht aan de Republ. Delegatie met doordruk aan de Republ. Minister van Defensie betreffende overtreding door de Nederlanders van de Truce-Agreement, in verband met het aanhouden te Palembang door hen van het Republ. vliegtuig R.I. 002, dat aldaar een noodlanding gemaakt zou hebben.

Laporan peristiwa hilangnya Pesawat RI 002 dalam jalur penerbangan
Tanjung Karang, Bengkulu, Jambi, Bukit Tinggi. Oktober 1948

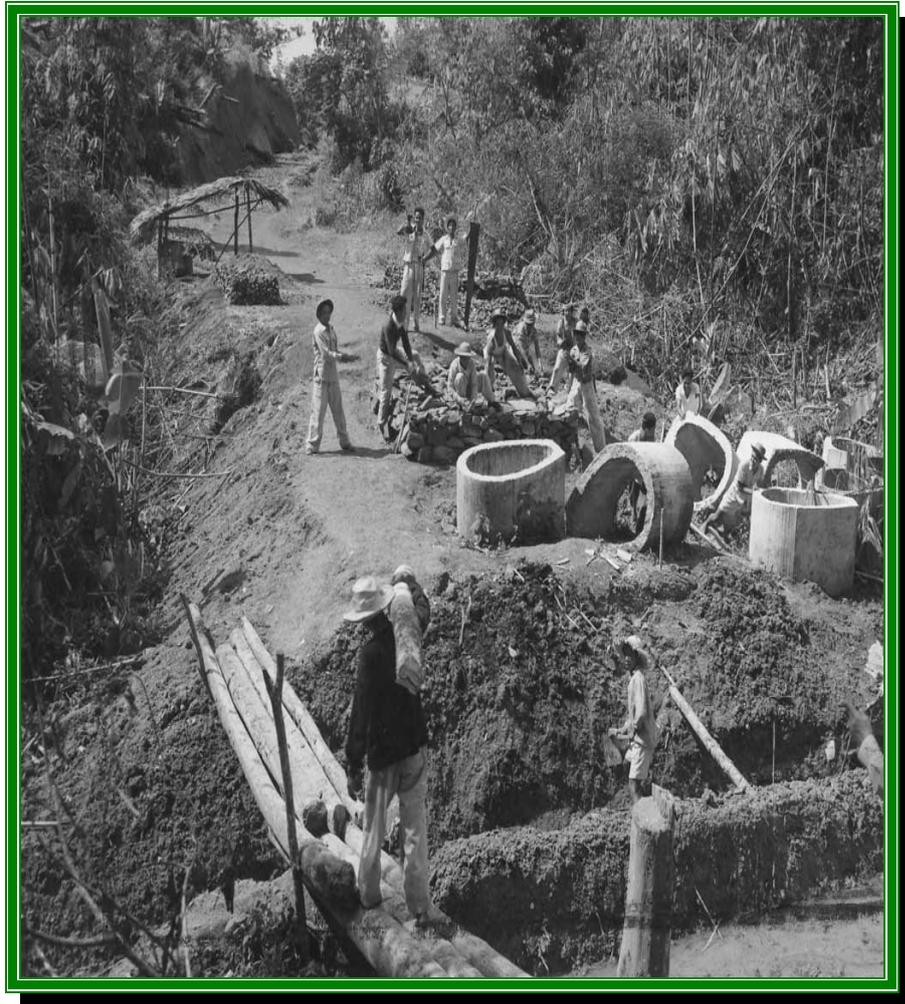
Djodja Documenten 5706



Perhubungan Kereta Api (KA), di stasiun Tanjung Karang.
25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-42



Pembangunan jembatan jalan raya oleh anggota Biro Rekonstruksi Nasional di Way Petai, Lampung Utara. 26 Juni 1952
Kempen No.520626 DD-21



Pembangunan jalan-jalan baru untuk melancarkan perhubungan
yang dikerjakan oleh anggota-anggota BRN di Way Petai,
Lampung Utara. 26 Juni 1952
Kempen No.520626 DD-37



Pelabuhan Panjang di Lampung. 28 Juni 1952
Kempen No.K520628 DD-51



Kantor Pos dan Telegraf Lampung. 1930
KIT NO. 0111/050



Jembatan besi, Lampung.
KIT NO. 0516/018



Jembatan menuju Lampung. 1930
KIT NO. 0111/056



Jembatan Way Awi di Kota Dalem, Lampung 1897.
KIT NO. 0110/016

PERDAGANGAN



Warung Koperasi yang didirikan oleh para transmigran di Way Petai
Lampung Utara. 5 Maret 1952
Kempen No.520305 DD-59



Pasar Metro di Lampung Tengah dengan pangkalan Bus.
25 Juni 1952

Kempen No.520625 DD-1



Pasar di Teluk Betung. 25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-4

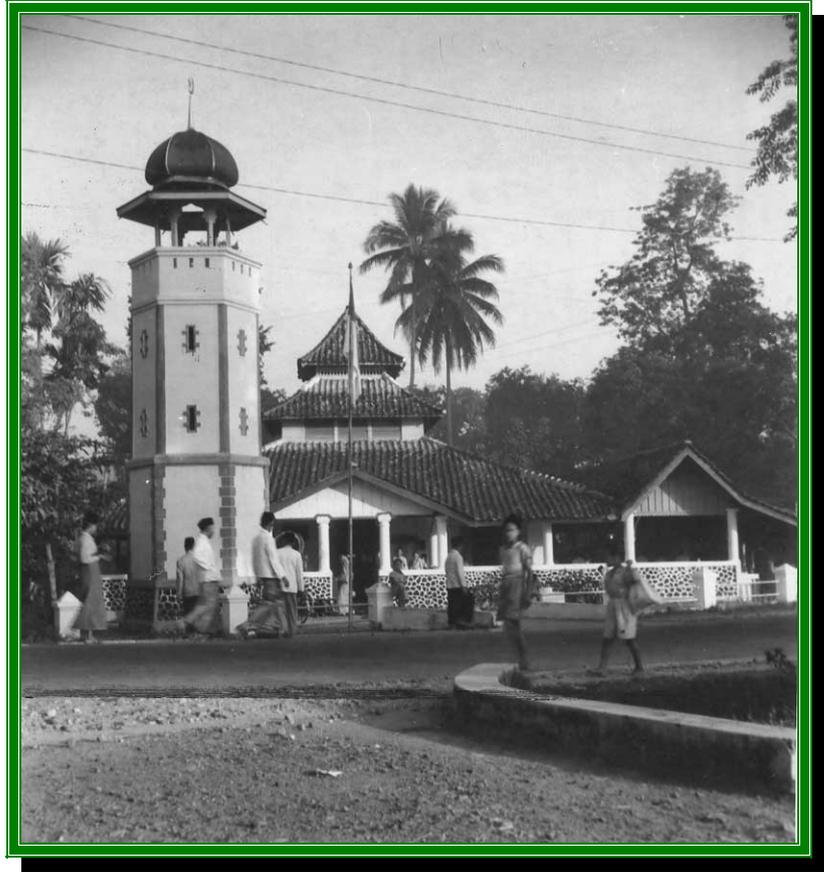


Pemandangan di Pasar Kota Bumi, Lampung Utara. 25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-5



Pasar Tanjung Karang. 28 Juni 1952
Kempen No.K520628 DD-27

AGAMA



Mesjid di Tanjung Karang Lampung. 25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-19



Gereja Protestan di Tanjung Karang. 27 Juni 1952
Kempen No.520627 DD-19

DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN

GEOGRAFI

1. Kontrak antara Kerajaan Banten dengan Kerajaan Palembang tentang ketentuan pembagian daerah Lampung dan Palembang. (Bahasa Belanda dan Arab Melayu). 18 Desember 1793.
Banten 78
10 lembar
2. Sketsa dari wilayah Teluk Betung.
De Haan E.73
1 Lembar
3. Peta pesisir Lampung (sebagian dari Pantai Sumatera bagian selatan).
De Haan B.52
1 lembar
4. Peta pantai Lampung dan daerah sekitarnya bagian dari Sumatera bagian selatan
De Haan H.9
1 lembar
5. Foto udara Kotabumi, Lampung.
KIT NO. 0755/069
1 Lembar
6. Gunung dan laut Rajabasa, Lampung.
KIT NO. 0953/031
1 lembar
7. Krakatau, daerah tempat orang-orang melabuhkan kapalnya, Lampung.
KIT NO. 0973/063
1 lembar

8. Foto udara Pantai Teluk Betung dengan bangunan-bangunannya, Lampung.
KIT NO. 0973/076
1 lembar
9. Gunung Karang di Pantai Panjang, Lampung.
KIT NO. 0973/090
1 lembar
10. Sungai Kuripan yang dipergunakan untuk Dam 45, Teluk Betung, Lampung.
KIT NO. 0047/012
1 lembar
11. Sungai/mata air di Wai Ngaras, Krui, Lampung.
KIT. NO.0935/021
1 lembar

PEMERINTAHAN

12. Pengumuman tentang pengembalian daerah Lampung menjadi provinsi tersendiri setelah tahun 1752 dipinjamkan kepada Sultan Banten. November 1808.
Plakaatboek Jilid XV Hal.355
1 lembar
13. Rumah Administratur di Tanjung Karang, Lampung.
November 1897
KIT NO. 0110/010
1 lembar
14. Kantor Residen Lampung. 1903 – 1933.
KIT NO. 0111/042
1 lembar

15. Pemuda/pemudi berpakaian daerah dan masyarakat ketika menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Mr.Fock di Teluk Betung, Lampung. 1921.
KIT NO. 0140/037
1 lembar
16. Perkantoran di persimpangan jalan, Lampung. 1930.
KIT NO. 0111/046
1 lembar
17. Rumah Residen bergaya Belanda, Lampung. 1930.
KIT NO. 0111/044
1 lembar
18. Laporan mengenai pembangunan Provinsi Lampung. 1977.
Setwapres Hamengkubuwono IX 523
2 lembar

TRANSMIGRASI

Pembukaan Lahan

19. Pembukaan lahan untuk jalan kolonisasi, Lampung.
KIT NO. 0315/010
1 lembar
20. Mesin traktor untuk membuka ladang di Bekri, Lampung.
KIT NO. 0555/010
1 lembar
21. Bajak tanah dengan traktor di daerah transmigrasi, Lampung. 1952.
KIT NO. 0141/071
1 lembar

22. Pembukaan hutan dengan menggunakan traktor yang dikerjakan oleh N.V. Sukadana, di Lampung. 29 Juni 1955.

Kempen No.K550629 DD3-1
1 lembar

23. Pembangunan rumah-rumah untuk anggota Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) Lampung yang dikerjakan bergotong royong oleh anggota BRN di Way Petai, Lampung Utara. 26 Juni 1952.

Kempen No.520626 DD-36
1 lembar

24. Pembukaan tanah dengan mengerjakan traktor-traktor untuk persediaan perkampungan transmigrasi di Lampung. 22 Juni 1955.

Kempen No.K550629 DD-6
1 lembar

Registrasi

25. Pendaftaran/registrasi para transmigran, Lampung.

KIT No.0315/032
1 lembar

26. Pemberian kartu bukti diri kepada para transmigran, Lampung.

KIT NO. 0314/082
1 lembar

27. Para Kolonisten menerima pembagian bibit tanaman, Lampung.

KIT NO.0314/032
1 lembar

28. Para transmigrasi menerima pembagian peralatan pertanian, Lampung.

KIT NO. 0315/014
1 lembar

29. Perkampungan kolonisasi pertama, Lampung.

KIT NO. 0315/012
1 lembar

Pemukiman

30. Besluit No.12 tentang pembuatan Way Sekampoeng bagian VI di Keresidenan Lampung. Desember 1937

Algemeene secretarie Ag.51782/37
39 lembar

31. Rumah-rumah pribadi, Lampung. 1930.

KIT NO. 0111/052
1 lembar

32. Kolonis Tabri bersama keluarga, Lampung.

KIT NO. 0314/034
1 lembar

33. Kompleks perumahan kolonisasi tempat kerja pabrik di Rambutan, Lampung.

KIT NO. 0314/044
1 lembar

34. Perumahan transmigran Jawa dan Penduduk masa kolonisasi, Lampung. Mei 1921.

KIT NO. 0047/016
1 lembar

35. Perumahan para kolonisasi di Lampung milik Senembah Mij, Lampung.
KIT NO. 0314/052
1 lembar
36. Salah satu bangun gudang di Kolonisasi Bandar Slamet Vinder Speelhims, Lampung.
KIT NO. 0314/046
1 lembar
37. Rumah-rumah buruh anggota Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) di Kota Bumi. 28 Juni 1952.
Kempen No.520628 DD-31
1 lembar
38. Keluarga Indonesia, Transmigran berasal dari Jawa di Tanjung Karang, Lampung. 25 Juni 1952.
Kempen No.520625 DD-31
1 lembar
39. Rumah darurat anggota BRN di Way Petai. 28 Juni 1952.
Kempen No.K520628 DD-9
1 lembar

Transmigrasi

40. Laporan tentang kolonisasi orang Jawa di Daerah Keresidenan Lampung Kwartal II. 1941.
Binnenlands Bestuur 2715
97 lembar
41. Surat dari Centrale Commissie voor Migratie en Kolonisatie van Inheemschen Batavia tentang kolonisasi pertanian orang-orang Jawa. 1942.
Binnenlands Bestuur 580
20 lembar

42. Surat dari Directeur van Binnenlandsch Bestuur kepada Resident van de Lampongsch Districten di Tandjoeng Karang tentang kolonie dari orang-orang intelektual Pribumi di Koloni Sukadana yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah Marga. 8 November 1942.
Binnenlands Bestuur 1227
7 lembar
43. Ichtisar Statistik Transmigrasi, Triwulan II.1952.
Kabinet Presiden 2250
3 lembar
44. Peta ichtisar daerah transmigrasi Sukadana (Residensi Lampung). 1952.
Kabinet Presiden RI 2629
1 lembar
45. Surat-surat tentang calon transmigrasi dari Biro Rekonstruksi Nasional (Ex. Pejuang) di Lampung Utara Wai Tenung. 1953.
Kabinet Presiden RI 2253
5 lembar
46. Laporan tahunan JAPETA (Jajasan Pembukaan Tanah Transmigrasi). 1953 – 1954.
Kabinet Presiden 211
11 lembar
47. Pernyataan beberapa partai terhadap Mosi DPRD Kabupaten Lampung Selatan tentang persoalan transmigrasi Lampung. Desember 1953 – Maret 1954.
Kabinet Presien RI 2257
18 lembar
48. Pengumuman No.2/1955 DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tentang penjelasan Mosinya mengenai persoalan transmigrasi di Lampung. Januari 1955.
Kabinet Presiden RI 1943
1 Lembar

Kunjungan

49. Menteri Sosial R.P. Suroso dan rombongan tiba di lapangan Teluk Betung, Lampung. 29 Juni 1955.
Kempen No.K550629 DD2-2
1 lembar
50. Menteri Sosial R.P. Suroso bersama rombongannya dengan menumpang trailer menuju ke hutan, untuk menyaksikan pembukaan hutan di Lampung. 29 Juni 1955.
Kempen No.K550629 DD2-7
1 lembar
51. Menteri Sosial R.P. Suroso bersama rombongannya tengah meninjau alat-alat dan traktor untuk pembukaan tanah dari N.V. Sukadana di Lampung. 29 Juni 1955.
Kempen No.K550629 DD1-8
1 lembar
52. Menteri Sosial R.P. Suroso dan rombongannya tengah meninjau perumahan para transmigran di Lampung. 29 Juni 1955.
Kempen No.550629 DD1-12
1 lembar

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

53. Besluit No.28 tentang Sekolah Umum Pribumi untuk kelas 2 di Goenoeng Soegih. 30 Maret 1898.
Algemeene secretarie Ag.3646/98
7 lembar

54. Laporan pendidikan dan kebudayaan di Lampung.
Juli 1968.
Sekretariat Kabinet 167
43 lembar
55. Gadis dalam kosum tarian, Lampung.
KIT NO. 0427/060
1 lembar
56. Keluarga dari Lampung dengan berpakaian daerah,
Lampung.
KIT NO. 1086/056
1 lembar
57. Pasangan Pengantin Derah Lampung.
KIT NO. 388/16
1 lembar
58. Kepala kampung/lurah bersama gadis-gadis penari
Lampung.
KIT NO. 1094/013
1 lembar
59. Pakaian adat pria dan wanita, Lampung.
KIT NO. 0385/002
1 lembar
60. Pakaian adat wanita, Lampung.
KIT NO. 0385/004
1 lembar
61. Pakaian pesta ibu dan anak wanitanya, Lampung.
KIT NO. 0288/024
1 lembar
62. Kain katun bermotif geometris, Krui, Lampung.
KIT NO. 0729/030
1 lembar

63. Kain katun hasil tenunan, Lampung.
KIT NO. 0729/004
1 lembar
64. Kain katun tenun motif Krui, Lampung.
KIT NO. 0729/031
1 lembar
65. Kain katun tenun sarang Penganten, Lampung.
KIT NO. 0729/048
1 lembar
66. Kain tenun dari Krui bermotif Kapal, Lampung.
KIT NO. 0729/010
1 lembar
67. Sarung katun motif ikat, Lampung.
KIT NO. 0729/024
1 lembar
68. Tenunan katun motif Krui, Lampung.
KIT NO. 0729/040
1 lembar
69. Tenunan Krui Antik, Lampung.
KIT NO. 0729/011
1 lembar

IRIGASI/PENGAIRAN

70. Bendungan irigasi air untuk sawah di Tulang Bawang, Lampung.
KIT NO. 0531/067
1 lembar

71. Irigasi air untuk sawah di Tulang Bawang, Lampung.
KIT NO. 0531/068
1 lembar
72. Pipa penampung air untuk irigasi di kali Metro,
Lampung.
KIT NO. 0534/071
1 lembar
73. Saluran air sungai Klingi di Tugu Mulyo, Lubuk Linggau.
16 April 1951
Kempen No.512373
1 lembar
74. Pengairan di Metro, Lampung. 24 Juni 1952.
Kempen No.520624 DD-19
1 lembar

PERKEBUNAN

75. Kultur verslag van de residentie Lampongsche
Districten. 1863.
Lampung 25
49 lembar
76. Surat-surat tentang persoalan perkaretan dari daerah
Sumatera Selatan yang mengalir ke daerah Lampung.
Mei 1966
Ekubang 579
6 lembar
77. Surat-surat tentang kelestarian hutan Provinsi Lampung
Setwapres Hamengkubuwono IX 401
8 lembar

78. Tanaman jagung di ladang yang baru dikerjakan di daerah Tugu Mulyo. 6 - 19 April 1951.
Kempen No.512368
1 lembar
79. Kebun Lada di Kota Bumi, Lampung. Juni 1952.
Kempen No.520624 DD-11
1 lembar
80. Kopi tanaman rakyat, di Lampung. 27 Juni 1952.
Kempen No.520627 DD-15
1 lembar
81. Foto udara perkebunan karet Wai Lima, Lampung.
KIT NO. 0641/035
1 lembar
82. Penyemaian pohon kopi, Lampung.
KIT NO. 0089/068
1 lembar
83. Menabur bibit tembakau, Lampung. 1950.
KIT NO. 0141/077
1 lembar

PERINDUSTRIAN

84. Surat tentang penambahan modal investasi Proyek Produksi Pangan di Kota Bumi (Lampung Utara). 26 April 1966.
Ekubang 631
2 lembar
85. Surat-surat tentang pendirian Pabrik Tapioka di Lampung.
16 Januari 1980
Setwapres Adam Malik 510
7 lembar

86. Besluit No.21 tentang pembangunan yang dulu pernah dipergunakan sebagai gudang penjualan garam di Kota Agung. 3 Februari 1897.
Algemeene secretarie Ag.2126/27
5 lembar
87. Mesin di Pabrik Tali, Tanjung Karang, Lampung.
KIT NO. 0740/054
1 lembar
88. Mesin pemintal di Pabrik Tali, Tanjung Karang, Lampung.
KIT NO. 0740/034
1 lembar
89. Peralatan pewarna benang di Pabrik Tekstil "Cisaat" Lampung.
KIT NO. 0723/057
1 lembar
90. Tukang-tukang kayu sedang menggergaji kayu untuk pembangunan di Teluk Betung. 25 Juni 1952.
Kempen No.520625 DD-44
1 lembar
91. Usaha pembikinan Tegel-Batu Cement dan Pemborong Bangunan di Kota Bumi. 28 Juni 1952.
Kempen No.K520628 DD-15
1 lembar
92. Perusahaan kayu di Selat Panjang (tempat penimbunan kayu yang baru ditebang dari hutan). 28 Juli 1952.
Kempen No.516610
1 lembar

HASIL BUMI

93. Pemetikan lada ketika panen, Lampung.
KIT NO. 0622/060
1 lembar
94. Hasil panen padi dari salah satu keluarga penduduk Desa Belitang (Martapura) Lampung. 6 - 19 April 1951.
Kempen No.512323
1 lembar
95. Pembikinan sagu aren di Selat Panjang (Batang pohon aren, sesudah dikupas kulitnya digiling dengan mesin menjadi bubuk). 28 Juli 1951.
Kempen No.516612
1 lembar
96. Karet (slab) hasil usaha rakyat ditimbun di Pelabuhan Panjang untuk diekspor ke luar negeri. 24 Juni 1952.
Kempen No.520624 DD-32
1 lembar
97. Koffie dalam gudang dikeringkan di Teluk Betung. Juni 1952.
Kempen No.520627 DD-7
1 lembar
98. Hasil ikan laut yang ditangkap. 23 Juni 1952.
Kempen No.520623 DD-22
1 lembar

PERTAMBAANGAN

99. Perusahaan tambang batubara di Panjang, Lampung.
KIT NO. 0481/062
1 lembar
100. Perusahaan tambang emas dan perak di Sudi Mampir,
Lampung.
KIT NO. 0486/072
1 lembar
101. Perusahaan tambang emas dan perak milik Belanda di
Sudi Mampir, Lampung.
KIT NO. 0487/008
1 lembar

PERHUBUNGAN

102. Besluit No.8 tentang perbaikan untuk sectie III jalan
dari Tandjung Karang melintasi Gedong Tatahan ke
Kota Agoeng, afdeling Ommelanden Telok Betong,
Keresidenan Distrik Lampongsch. 25 April 1902.
Algemeene secretarie Ag.8580/02
7 lembar
103. Besluit No. 2 tentang robohnya jembatan Kocala di Jalan
utama Telok Betong ke Kalianda. 5 Februari 1902.
Algemeene secretarie Ag.3359/02
3 lembar
104. Besluit No.1 tentang Kabelbrug yang kaku tipe U.35
model 1924, melintasi Way Madja diantara KM 117-118
jalan Kota Agung-Sanggi, Teluk Betung. 8 April 1931.
Algemeene secretarie Ag.9474/31
9 lembar

105. Laporan peristiwa hilangnya Pesawat RI 002 dalam jalur penerbangan Tanjung Karang, Bengkulu, Jambi, Bukit Tinggi. Oktober 1948.
Djodja Documenten 5706
66 lembar
106. Perhubungan Kereta Api (KA), di stasiun Tanjung Karang.
25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-42
1 lembar
107. Pembangunan jembatan jalan raya oleh anggota Biro Rekonstruksi Nasional di Way Petai, Lampung Utara. 26 Juni 1952.
Kempen No.520626 DD-21
1 lembar
108. Pembangunan jalan-jalan baru untuk melancarkan perhubungan yang dikerjakan oleh anggota-anggota BRN di Way Petai, Lampung Utara. 26 Juni 1952.
Kempen No.520626 DD-37
1 lembar
109. Pelabuhan Panjang di Lampung. 28 Juni 1952.
Kempen No.K520628 DD-51
1 lembar
110. Kantor Pos dan Telegraf Lampung. 1930.
KIT NO. 0111/050
1 lembar
111. Jembatan besi, Lampung.
KIT NO. 0516/018
1 lembar

112. Jembatan menuju Lampung. 1930.
KIT NO. 0111/056
1 lembar
113. Jembatan Way Awi di Kota Dalem, Lampung 1897.
KIT NO. 0110/016
1 lembar
114. Wisatawan di daerah Menggala, Tulang Bawang, 1922.
KIT NO. 0952/023
1 lembar

PERDAGANGAN

115. Catatan tentang perdagangan lada di Tulang Bawang.
1787.
Banten 85
16 lembar
116. Warung Koperasi yang didirikan oleh para transmigran
di Way Petai Lampung Utara. 5 Maret 1952.
Kempen No.520305 DD-59
1 lembar
117. Pasar Metro di Lampung Tengah dengan pangkalan
Bus.
25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-1
1 lembar
118. Pasar di Teluk Betung. 25 Juni 1952.
Kempen No.520625 DD-4
1 lembar

119. Pemandangan di Pasar Kota Bumi, Lampung Utara.
25 Juni 1952
Kempen No.520625 DD-5
1 lembar
120. Pasar Tanjung Karang. 28 Juni 1952.
Kempen No.K520628 DD-27
1 lembar

AGAMA

121. Mesjid di Tanjung Karang Lampung. 25 Juni 1952.
Kempen No.520625 DD-19
1 lembar
122. Gereja Protestan di Tanjung Karang. 27 Juni 1952.
Kempen No.520627 DD-19
1 lembar

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Lampung Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.